

**PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
PADA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**OLEH
DEDI DARMA YANTA
NIM 352002014**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FEBRUARI 2007**

**PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
PADA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

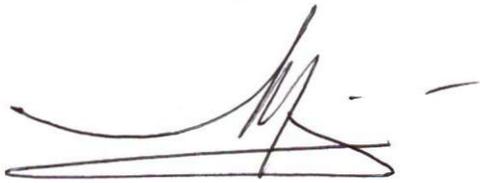
**Diajukan kepada
Universitas Muhammadiyah Palembang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan**

**Oleh
Dedi Darma Yanta
NIM 352002014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
Februari 2007**

Skripsi oleh Dedi Darma Yanta ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Palembang, 7 Februari 2007
Pembimbing I,**



Drs. M. Alimansyur

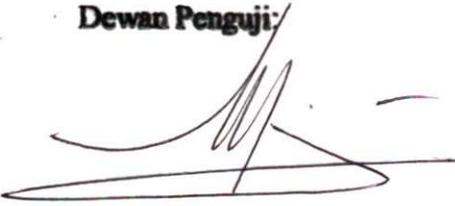
**Palembang, 7 Februari 2007
Pembimbing II,**



Dra. Nurhayati Dina

Skripsi oleh Dedi Darma Yanta ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal, 21 Februari 2007

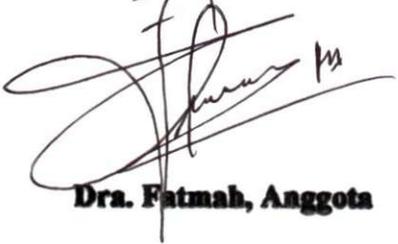
Dewan Penguji:



Drs. M. Ali Mansyur, Ketua



Dra. Nurhayati Dina, Anggota



Dra. Fatmah, Anggota

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah,**



Dra. Nurhayati Dina

**Mengesahkan
Dekan
FKIP UMP,**



Drs. H. A. Hussein Fattah, M.M.

- Dengan karunia Allah SWT. Skripsi ini
kupersembahkan kepada:**
- ❖ Ayah (Asman Riduan) dan Ibu (Khoijah Unik) yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan untuk mencapai keberhasilanku
 - ❖ Ayuk (Dev) dan adik-adikku (Dewi, Desi) yang tersayang
 - ❖ Seseorang yang selalu memberi dukungan kepadaku
 - ❖ Teman-temaniku (Delly, Dhinie, Donie, dan Rudi) yang selalu memotivasi
 - ❖ Teman-temaniku Angkatan 2002
 - ❖ Almaterku

Motto :

❖ *Hidup adalah Perjuangan, perjuangan adalah tantangan dan setiap tantangan adalah peluang untuk meraih suatu keberhasilan (Dedi)*

ABSTRAK

Yanta, Dedi Darma. 2007. *Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Sarjana (S1), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, Pembimbing: (I) Drs. M. Alimansyur, (II) Dra. Nurhayati Dina

Kata kunci: peranan, Tentara Nasional Indonesia, serangan umum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis tentang peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Aksi polisionil Belanda di Indonesia. 2. Terjadinya serangan umum 1 Maret 1949. 3. Peranan TNI pada serangan umum 1 Maret 1949. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Aksi polisionil Belanda merupakan tindakan pengamauan yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah pendudukan di Republik Indonesia. Aksi polisionil Belanda tersebut terjadi sebanyak 2 kali, yaitu Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1948. 2. Sebagai puncak dalam perang gerilya dalam menghadapi pasukan Belanda yang terus berusaha merongrong kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, TNI bersama rakyat Indonesia pada tanggal 1 Maret 1949 melakukan serangan terbuka yang lebih dikenal dengan *Serangan Umum 1 Maret 1949*. Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan secara mendadak dan serentak dengan tujuan menghancurkan kedudukan-kedudukan Belanda dan menduduki kota Yogyakarta walau hanya 6 jam. 3. Peranan TNI pada Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta adalah tindakan ofensif TNI yang merupakan pengatur siasat perang gerilya dan TNI merupakan Pusat Komando Serangan Umum 1 Maret 1949. Belanda mulai meninggalkan Indonesia sejak dilakukannya pengakuan kedaulatan republik Indonesia Serikat oleh Belanda yakni pada bulan Desember 1949 sebagai salah satu perwujudan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan hendaknya terus menggali dan mempelajari peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau karena akan sangat bermanfaat untuk menjadi pedoman dan pegangan pada masa yang akan datang. 2. Bagi masyarakat umumnya dan para peminat sejarah khususnya diharapkan dapat mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. 3. Bagi pemerintah khususnya pihak perpustakaan wilayah Sumatera Selatan hendaknya lebih melengkapi bahan bacaan dan fasilitas lain mengenai sejarah umumnya dan khususnya tentang sejarah perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya jua, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, terutama dari segi redaksinya, dan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang terkait maka, dalam kesempatan yang berharga inilah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Hussein Fattah, M.M. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Makmun Rusydi, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
3. Ibu Dra. Fatmah, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
4. Ibu Dra. Nurhayati Dina, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus Pembimbing II.
5. Bapak Drs. M. Ali Mansyur, selaku pembimbing I.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta para staf dan karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamamdiyah Palembang.
7. Ayahanda dan ibunda tercinta, kakak-kakakku dan adik-adikku sekeluarga yang telah banyak berkorban dan memberikan semangat selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di bangku kuliah.

8. Sahabat-sahabatku: Delly, Mardian, Doni, Rudi serta teman-teman angkatan 2002 yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. akan memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSetujuan	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN DAN TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Kajian	5
F. Definisi Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kehidupan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan	6
1. Kehidupan Politik	6
2. Kehidupan Ekonomi	7
B. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia	10
C. Kedatangan Pasukan Sekutu dan Orang-orang NICA ke Wilayah Republik Indonesia	12
1. Tujuan Kedatangan Pasukan Sekutu di Indonesia	12
2. Sikap Rakyat Indonesia Terhadap Kedatangan Sekutu dan Orang-orang NICA di Indonesia	14
D. Usaha Belanda Menguasai Indonesia Setelah Kedatangan Sekutu	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
1. Pendekatan Penelitian	22
1.1 Pendekatan Sosiologi	23
1.2 Pendekatan Ilmu Politik	23
1.3 Pendekatan Geografi	23
1.4 Pendekatan Ekonomi	23

2. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Sumber Data.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
F. Prosedur Penelitian.....	28
G. Pengecekan Keabsahan Penelitian	29
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Aksi Polisionil Belanda di Indonesia	33
1. Agresi Militer Belanda I.....	33
2. Agresi Militer Belanda II	37
B. Serangan Umum 1 Maret 1949	40
1. Tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949	42
2. Dampak Serangan Umum 1 Maret 1949.....	43
C. Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.....	45
1. Serangan Umum 1 Maret 1949 Merupakan Tindakan Ofensif TNI	46
2. TNI merupakan Pengatur Siasat Perang Gerilya.....	47
3. TNI merupakan Pusat Komando Serangan Umum 1 Maret 1949.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR RUJUKAN.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih menganggap bahwa dirinya tetap berdaulat atas Indonesia, sehingga perjuangan bangsa Indonesia kala itu terbagi menjadi dua bagian, yakni: “Perjuangan keluar untuk memperoleh pengakuan terhadap adanya suatu negara Republik Indonesia yang meliputi seluruh tanah air Indonesia, dan perjuangan ke dalam untuk menegakkan susunan ketatanegaraan yang baru yang berpedoman kepada Pancasila” (Simatupang, 1981:183).

Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Sekutu mendarat secara besar-besaran. “Seluruhnya berjumlah 30 batalyon, tersebar di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, dan Padang, sebagai pimpinan pasukan Sekutu adalah Letnan Jenderal Philips Christions” (Engelen, 1997:174).

Kedatangan pasukan Sekutu yang didalamnya terdapat orang-orang Belanda menjadikan awal kehidupan Republik Indonesia ditandai dengan suasana yang mercekam, hal tersebut disebabkan oleh perbuatan orang-orang NICA (*Netherland Indiische Civil Administration*) yang bergabung dalam pasukan Sekutu tersebut semakin hari semakin membuat suasana tegang antara para pejuang di masa kemerdekaan dengan tentara NICA terutama yang berasal dari Belanda. Tentara NICA tidak segan-segan melakukan teror sehingga menimbulkan kemarahan di pihak Indonesia yang sejak awal sudah mencurigai maksud kedatangan tentara NICA ini.

Tujuan kedatangan orang-orang NICA pada awalnya sama dengan tujuan kedatangan tentara Sekutu di Indonesia, karena sejak awal orang-orang NICA yang datang ke Indonesia hanya sebagai pegawai sipil Sekutu yang bertugas membantu kelancaran tugas tentara Sekutu di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya orang-orang NICA tersebut menggunakan kesempatan ini untuk menyusun kembali kekuatannya guna berusaha mengembalikan kekuasaannya di bumi Indonesia yang pernah tertanam selama hampir tiga setengah abad lamanya sejak kedatangannya pada tahun 1596.

Sebagai suatu negara yang baru merdeka dalam situasi dunia yang tidak menentu akibat terjadinya perang dunia, Republik Indonesia terus menerus menghadapi cobaan yang bertujuan merongrong kekuasaan dan kedaulatan negara sehingga dibutuhkan suatu angkatan perang yang mampu melawan dan melindungi bangsa Indonesia dari setiap tindakan baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri.

Seperti halnya negara lain di dunia, Republik Indonesia memiliki angkatan perang yang pada awal berdirinya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). "Sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian nama tersebut mengalami perubahan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), selanjutnya dari TKR berubah kembali menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI), akhirnya nama tersebut berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)" (Tim Lembaga Analisis Informasi, 2000:3).

Belanda yang sejak awal terus menganggap dirinya masih berkuasa di Indonesia sering melakukan tindakan yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan terhadap daerah pendudukan. Tindakan pengamanan tersebut merupakan agresi bagi bangsa

Indonesia karena nyata-nyata telah merongrong kewibawaan dan kekuasaan Republik Indonesia, adapun agresi militer Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 27 Juli 1947 dengan mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di darat, laut, dan udara. Pendaratan pasukan dilakukan di Panarukan Jawa Timur, akan tetapi agresi militer tersebut mendapatkan perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. "Rakyat menghadang gerak maju pasukan Belanda serta menyerang setiap kendaraan Belanda yang berusaha memasuki keresidenan Besuki dan Malang Jawa Timur, perlawanan terhadap Belanda terus dilakukan baik secara terang-terangan ataupun secara gerilya" (Salim, 1995:24).

Agresi militer Belanda yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948 ditujukan untuk menguasai Republik Indonesia yang ketika itu beribukota di Yogyakarta merupakan puncak dari aksi polisionil Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Agresi tersebut dilancarkan ketika bangsa Indonesia sedang berada pada kondisi yang belum pulih akibat terjadinya pemberontakan PKI di Madiun, sebagai akibatnya pasukan Belanda berhasil menduduki ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta.

Berbagai reaksi dari dunia internasional bermunculan atas agresi militer Belanda II tersebut, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru yang berkata bahwa, "Di Indonesia telah terjadi agresi yang paling tidak kenal malu, dan kita menyesalkan bahwa sikap beberapa negara yang ternyata secara diam-diam menyetujui atau bahkan menerima dengan baik agresi yang dilakukan Belanda tersebut dengan alasan solidaritas sesama anggota Uni Barat" (Nasution, 1983:132).

Selain kecaman yang berasal dari Perdana Menteri India di atas, kecaman lainnya juga datang dari Liga Arab, hal ini dapat dilihat dari pernyataan sekretarisnya Abdurrahman Azam Phaza dalam Nasution berikut ini:

Negara-negara Arab pun menyatakan simpatinya atas perjuangan Republik Indonesia, Liga Arab akan meminta kepada para anggotanya untuk menyokong perjuangan yang dilakukan oleh Republik Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB dan berjanji tidak akan mengakui suatu pemerintahan apapun yang didirikan oleh Belanda di Indonesia.. (Nasution, 1983:411).

Selain itu, Liga Arab melalui sekretarisnya mengajak negara anggota Liga Arab untuk mendukung dan membantu perjuangan yang sedang dilakukan pemerintah Republik Indonesia di forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah pada hakekatnya tidak pernah mengakui suatu bentuk pemerintahan apapun yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Indonesia, selain itu, pernyataan simpati yang disampaikan oleh Perdana Menteri India merupakan pernyataan perasaan simpati yang sangat mendalam, hal ini didasari oleh perasaan senasib seperjuangan sebagai bangsa di rumpun Asia yang ingin membebaskan diri terhadap segala bentuk ancaman terhadap negaranya.

Dukungan dan simpati tersebut merupakan modal bagi perjuangan fisik bangsa Indonesia dalam menghadapi pasukan Belanda, baik itu perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1949, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memutuskan untuk melakukan serangan umum dengan tujuan utama untuk merebut kembali ibukota negara di Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap kembali peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada serangan umum 1 Maret 1949.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimanakah aksi polisionil Belanda di Indonesia?
2. Bagaimanakah terjadinya serangan umum 1 Maret 1949?
3. Bagaimanakah peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta?

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini tidak menyimpang dari tema yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada *scope spctial* (tempat) yakni di daerah Yogyakarta, sedangkan untuk *scope temporal* (waktu) penulis membatasi sampai dengan tahun 1949.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aksi polisionil Belanda di Indonesia
- b. Untuk mengetahui terjadinya serangan umum 1 Maret 1949
- c. Untuk mengetahui peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada serangan umum 1 Maret 1949.

E. Kegunaan Kajian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan informasi bagi pembaca yang akan mengkaji lebih lanjut tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya serangan umum 1 Maret 1949.
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi para pecinta sejarah khususnya sejarah negara Republik Indonesia.

F. Definisi Isilah

1. *GYUGUN* : Pasukan yang dibentuk dan dilatih oleh tentara Jepang
2. *AFNI* : (*Allied Force Netherlands East Indies*) yaitu komando khusus yang ditugaskan di Indoensia.
3. *LIGA ARAB* : Suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara Arab yang terletak di kawasan Timur Tengah.
4. *NICA* : (*Netherland Indiische Civil Administration*) yakni pegawai sipil Belanda yang bertugas membantu kelancaran tugas Pukaan Sekutu di Indonesia.
5. *PKI* : Partai Komunis Indonesia, suatu partai yang berhaluan komunis serta bertujuan mengganti ideologi negara Republik Indonesia dengan faham komunis
6. *SEAC* : (*South East Asia Command*) yakni komando Sekutu yang bertugas di Wilayah Asia Tenggara
7. *SERANGAN UMUM* : Serangan yang dilakukan serentak dan bersama-sama dengan tujuan untuk merebut kembali Yogyakarta
8. *TNI* : Tentara Nasional Indonesia, merupakan suatu organisasi militer yang bertugas menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
9. *WEHRKREISE* : Pembagian daerah pertahanan dalam satu wilayah keresidenan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kehidupan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan

1) Kehidupan Politik

Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah RI mulai menentukan kebijakan politiknya terutama politik luar negeri, pemerintah RI mulai merintis hubungan dengan luar negeri. Secara formal hubungan tersebut dilakukan secara bilateral antara RI dengan Belanda. Hubungan tersebut menjadi berkembang sesudah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut campur.

Keterlibatan PBB untuk membahas masalah RI, dimulai dengan usul utusan Republik Sosialis Ukraina pada tanggal 21 Januari 1946. PBB diminta untuk campur tangan, karena ternyata tentara Inggris yang bertugas di Indonesia telah menggunakan tentara Jepang untuk menindas gerakan rakyat Indonesia” (Posponegoro, 1988:135).

Penindasan terhadap rakyat Indonesia tersebut merupakan suatu ancaman terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, hal ini dikarenakan perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap segala bentuk penindasan dapat menimbulkan peperangan terbuka yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Akhirnya atas peran serta PBB melalui jasa Komisi Tiga Negara (KTN), tercapailah persetujuan Renville. Bahkan atas peranan politik luar negeri RI itu pula, maka pada suatu konferensi yang dilaksanakan di New Delhi India, dihasilkan suatu keputusan yang menuntut untuk dipulihkannya Republik Indonesia kepa keadaan semula. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada dewan

Keamanan PBB. Karena peserta Konferensi di New Delhi tersebut merupakan suatu unsur yang cukup besar dalam lingkungan PBB, maka Dewan Keamanan PBB memberikan perhatian yang besar atas keputusan konferensi tersebut.

Akhirnya pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan keamanan PBB mengeluarkan suatu resolusi seperti yang dijelaskan oleh Poesponegoro (1992:139) berikut ini:

1. Segera melakukan gencatan senjata, dan
2. Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta.

Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut menentukan pula dengan jelas garis-garis dan jangka waktu penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda ke pihak Indonesia, keberhasilan pemerintah RI untuk menarik perhatian dunia atas nasib bangsa Indonesia tersebut tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia yang dilaksanakan secara jujur, damai, dan bersedia berunding untuk menyelesaikan masalah atas prinsip-prinsip Indonesia merdeka dan bersedia berperang untuk membela diri apabila diserang.

2) Kehidupan Ekonomi

Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia sangat kacau, inflasi yang berlebihan menimpa Indonesia. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tak terkendali bahkan peredaran mata uang Jepang di masyarakat diperkirakan sejumlah 4 milyar. "Pada bulan Agustus 1945, mata uang Jepang yang beredar di Jawa saja mencapai 1,6 milyar, jumlah ini bertambah lagi ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank" (Poesponegoro, 1992:172).

Pemerintah Indonesia sendiri tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi hal tersebut, hal ini dikarenakan pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku lagi karena pemerintah RI sendiri belum mempunyai mata uang sebagai penggantinya. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat kecil, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.

Selain dari kesulitan yang muncul akibat inflasi tersebut, penderitaan rakyat semakin bertambah ketika Belanda melakukan blokade laut. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan RI, tindakan blokade ini dimulai pada bulan November 1945, akibat blokade ini barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat di ekspor ke luar negeri.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesulitan di bidang ekonomi tersebut adalah dengan mengeluarkan uang kertas baru yang bernama Uang Republik Indonesia (ORI) untuk menggantikan mata uang Jepang. Selain itu, pada tanggal 1 November 1946 pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia yang bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Situasi negara yang sedang dilanda perang sangat mempengaruhi situasi ekonomi, pendapatan pemerintah semakin tidak sebanding dengan pengeluaran. Hasil produksi perkebunan dan pertanian sebagian besar tidak dapat diekspor secara normal karena blokade yang dilakukan oleh Belanda. Dengan demikian penghasilan pemerintah hanya semata-mata bergantung dari produksi petani, akan tetapi berkat dukungan seluruh rakyat Indonesia pemerintah RI berhasil bertahan dalam situasi ekonomi yang sedang kacau tersebut.

B. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Sesuai dengan ketentuan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, maka seluruh alat-alat negara seperti pamongpraja, kepolisian, tentara PETA (Pembela Tanah Air) menjadi perlengkapan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya antara lain, "Menegaskan bahwa Republik Indonesia telah berdiri sehingga perlu dibentuk tentara bernama Badan Ketentaraan Rakyat, dan sebagai intinya ditunjuk orang-orang bekas PETA, *Heiho* dan *Gyu Gun*" (Engelen, 1997:99), maka dengan spontan didirikanlah BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang anggotanya berintikan tentara PETA, *Heiho* dan *Gyu Gun* (pasukan bentukan Jepang) yang telah cukup terlatih di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun alasan para pemimpin Republik Indonesia pada saat itu membentuk angkatan bersenjata dengan nama BKR adalah untuk menghindari salah paham dari pihak Jepang, karena sesuai dengan namanya BKR hanya sebagai sebuah badan yang mempunyai tugas untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan rakyat semata sesuai dengan kondisi di Indonesia pada waktu itu.

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 nama BKR kemudian diganti dengan nama TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang bermarkas besar di Yogyakarta. Pemimpin tertinggi ditunjuk Supriyadi, salah seorang pemimpin pemberontak PETA, sedangkan sebagai Kepala Staf Umum adalah Mayor Jenderal Oerip Soemohardjo mantan tentara KNIL. Pada awal pembentukannya hampir semua mahasiswa kodeketeran baik yang berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masuk ke dalam TKR, hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa perjuangan yang dilaksanakan ini harus

dilakukan dengan menyusun, membangun, dan menyelenggarakan pilar-pilar suatu negara yang merdeka yang salah satunya adalah memiliki suatu angkatan perang.

Pada awal pembentukannya, TKR terdiri dari beberapa divisi, yakni 10 divisi yang berada di pulau Jawa dan 6 divisi yang berada di Sumatera. Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat, memerlukan satu pimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi segala persoalan akibat dari perkembangan tersebut, hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:

“Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada bulan November 1945 atas prakarsa dari markas tertinggi TKR diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR, yang terpilih sebagai pimpinan tertinggi kala itu adalah Kolonel Sudirman, Komandan Divisi V/Banyumas, sebulan kemudian yakni pada tanggal 18 Desember 1945 Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal, sedangkan Oerip Soemohardjo kembali menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal” (Poesponegoro, 1992:109).

Pada bulan Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan akhirnya atas inisiatif Jenderal Soedirman nama TKR berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI), hal ini berdasarkan pendapat Soedirman bahwa TRI merupakan tentara nasional dan tentara rakyat yang percaya pada kekuatan sendiri dengan tidak mengandalkan bantuan dari luar negeri. Jumlah divisi pun dikurangi yakni di Jawa menjadi 7 divisi sedangkan di Sumatera menjadi 4 Divisi. Selanjutnya, dengan tujuan untuk mempersatukan organisasi perjuangan yang bermunculan pada waktu itu, maka Presiden Soekarno pada tanggal 5 Mei 1947 mengeluarkan penetapan untuk mempersatukan organisasi-organisasi perjuangan tersebut dalam satu wadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang memutuskan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mempersatukan TRI dengan laskar-laskar perjuangan yang ada pada waktu itu ke dalam suatu organisasi tentara, dan pelaksanaannya dilakukan oleh panitia yang langsung dipimpin oleh presiden sendiri dengan dibantu oleh tiga orang wakil ketua, yakni: Wakil Presiden, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Panglima Besar dengan anggota-anggota terdiri dari Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara (MBT) dan pimpinan badan-badan perjuangan”. (Poesponegoro, 1992:145-146).

Hasil kerja dari panitia yang dipimpin langsung oleh presiden tersebut menghasilkan Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juni 1947 telah disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana semua laskar-laskar perjuangan dan organisasi perjuangan yang ada di seluruh Indonesia pada waktu itu bergabung menjadi satu dalam organisasi TNI dengan pucuk pimpinan tertinggi Panglima Besar Jenderal Soedirman.

C. Kedatangan Pasukan Sekutu dan Orang-Orang NICA Ke Wilayah Republik Indonesia

1) Tujuan Kedatangan Pasukan Sekutu di Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disambut hangat oleh seluruh rakyat Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia berkobar pertempuran dan perlawanan rakyat dalam menghadapi tentara Jepang. Ketika bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tersebut datanglah tentara Sekutu yang dibelakangnya turut serta tentara Belanda. Kedatangan tentara Sekutu yang dibelakangnya membonceng orang-orang Belanda telah menimbulkan amarah bagi rakyat Indonesia sehingga hal ini akhirnya menyulut terjadinya perlawanan

rakyat Indonesia terhadap kehadiran tentara NICA tersebut khususnya perlawanan terhadap kedatangan Belanda.

Menurut Poesponegoro (1992:150), tujuan kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melucuti tawanan perang dan para tahanan yang berada di dalam kamp
2. Mengawal, melucuti dan mengembalikan tentara Jepang yang berada di Indonesia ke negara asalnya.

Tujuan kedatangan orang-orang NICA pada awalnya sama dengan tujuan kedatangan tentara Sekutu di Indonesia, karena sejak awal orang-orang NICA yang datang ke Indonesia hanya sebagai pegawai sipil Sekutu yang bertugas membantu kelancaran tugas tentara Sekutu di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya orang-orang NICA tersebut menggunakan kesempatan ini untuk menyusur kekuatannya guna berusaha mengembalikan kekuasannya di bumi Indonesia yang pernah tertanam selama hampir tiga setengah abad lamanya, sejak kedatangannya pada tahun 1596.

Dengan demikian, beban perlawanan rakyat Indonesia dalam menegakkan kedaulatannya semakin bertambah, hal ini disebabkan karena perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia selain menghadapi sisa-sisa pasukan Jepang, juga menghadapi pasukan Sekutu yang dengan sengaja membantu orang-orang NICA agar dapat kembali menanamkan kekuasannya di Indonesia. Hal ini berarti awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ditandai dengan pendaratan pasukan Sekutu yang bertujuan melucuti pasukan Jepang yang ada di Indonesia, pada perkembangan selanjutnya tentara Sekutu tersebut memberikan perlindungan kepada

orang-orang NICA yang menggunakan kedok pasukan Sekutu untuk sampai dan masuk kembali ke Indonesia.

2) Sikap Rakyat Indonesia Terhadap Kedatangan Sekutu dan Orang-Orang NICA di Indonesia

Sebelum pendaratan pasukan Sekutu di wilayah Indonesia, datanglah utusan khusus pasukan Sekutu yang bertujuan mempelajari keadaan di Indonesia dan melaporkannya kepada Komando Pasukan Sekutu untuk wilayah Asia Tenggara. Adapun utusan khusus tersebut beranggotakan sebagai berikut: “Lord Louis Mountbatte sebagai komandan *South East Asia Command* (SEAC) yaitu komando Sekutu yang bertugas untuk wilayah Asia Tenggara yang bermarkas di Singapura, Sir Philip Christison sebagai panglima *Allied Force Netherlands East Indies* (AFNI) yaitu komando khusus yang akan ditugaskan ke Indonesia, serta C.H.O Van Derpalas yang merupakan wakil dari NICA” (Sekretariat Negara: 1988:43).

Setelah mendapat laporan tentang keadaan Indonesia dari utusan khusus tersebut, akhirnya datanglah pasukan sekutu yang didalamnya terdapat orang-orang NICA. Soekarno yang ketika itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan pernyataan atas kedatangan pasukan sekutu ini dengan syarat, “Pasukan sekutu tidak melakukan hal-hal yang dianggap merugikan bagi bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang telah merdeka, dan sebagai imbalannya pemerintah Indonesia bersedia membantu tugas-tugas Sekutu dalam mengatur pemulangan kembali tawanan perang yakni tentara Jepang untuk kembali ke negara asalnya” (Sekretariat Negara, 1988:44).

Pihak Sekutu yang telah melihat secara langsung keadaan di Indonesia pada saat itu sudah memiliki pemerintahan sendiri dan didukung oleh seluruh rakyatnya, akhirnya mereka menyatakan sikap untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan tujuan awal kedatangan pasukan Sekutu serta sikap pasukan sekutu yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, maka rakyat Indonesia menyambut kedatangan pasukan Sekutu tersebut dengan sikap terbuka, karena rakyat Indonesia percaya bahwa Sekutu benar-benar akan melaksanakan tugas utamanya, namun kedatangan mereka yang diboncengi oleh orang-orang NICA yang semakin hari semakin banyak jumlahnya dan terus-menerus menyusun kekuatan pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Republik Indonesia akan keinginan orang-orang Belanda yang kali ini memakai nama NICA untuk kembali menjajah Republik Indonesia dan menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia.

Keinginan untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kejadian yang sangat meresahkan penduduk, dimana kota Jakarta menjadi sasaran orang-orang NICA tersebut. Tindakan NICA tersebut akhirnya mendapat perlawanan dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, sehingga menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak, "Sikap ini merupakan tanda bahwa rakyat Indonesia tidak ingin kembali dijajah oleh Belanda" (Sekretariat Negara, 1988:49).

Pada bulan Agustus hingga Oktober 1945, terjadi perebutan kekuasaan antara Indonesia yang berusaha menegakkan kedaulatan sebagai negara yang baru merdeka dan Jepang yang mencoba mempertahankan keadaan *Status Quo* sampai Sekutu datang ke Indonesia.

“Pada tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu mendarat di Tanjung Priok, dalam rombongan pasukan Sekutu tersebut terdapat pasukan Belanda, kedatangan pasukan Sekutu yang didalamnya terdapat pasukan Belanda inilah yang mendapat reaksi keras atau tentangan dari rakyat Indonesia” (Engelen, 1997:136). Untuk menunjukkan betapa besar tekad rakyat Indonesia untuk merdeka sekaligus mempertahankan kemerdekaan tersebut maka, pada tanggal 19 September 1945 diadakanlah Rapat Raksasa di Lapangan Ikada (sebelah Barat Stasiun Gambir, Jakarta).

Walaupun pihak Jepang melarang diadakannya Rapat Raksasa tersebut, tapi dengan tekad bulat dan semangat yang berkobar-kobar untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan seluruh rakyat Indonesia sanggup mempertahankan kemerdekaan tersebut sampai titik darah penghabisan, maka rakyat tetap berbondong-bondong mendatangi lokasi rapat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tentara Jepang yang ketika itu bersenjata lengkap dapat dipatahkan oleh semangat bangsa Indonesia yang memiliki keyakinan diri hendak menentukan nasib sendiri tanpa dijajah oleh bangsa manapun.

Reaksi keras atas masuknya Sekutu dengan membonceng Belanda ke Indonesia juga mendapat tentangan keras dari rakyat Indonesia yang ada di Surabaya, Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Pada tanggal 19 September 1945 Mereka (Belanda) menaikkan bendera Belanda – Merah Putih Biru di Hotel Yamato (bekas hotel Oranje, sekarang hotel Gajah Mada) di Tunjungan Surabaya. Rakyat Surabaya tersinggung harga dirinya, lalu beramai-ramai menyerbu Hotel Yamato, warna biru dirobek dari bendera itu, tinggal warna merah dan putih yang terpancang sebagai lambang kemerdekaan bangsa Indonesia (Engelen, 1997:192).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa semangat rakyat Indonesia untuk menyatakan dan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar, walaupun sebagai akibat dari insiden bendera itu terjadi perkelahian dan pertempuran, akan tetapi dengan semangat yang membara rakyat Indonesia siap menghadapinya, hal ini ditunjukkan oleh rakyat Surabaya yang pada keesokan harinya melakukan arak-arakan secara besar-besaran di seluruh kota untuk menunjukkan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan.

“Di Semarang (Jawa Tengah), kedatangan pasukan Sekutu terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethell” (Engelen, 1997:194). Secara umum, pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang oleh pasukan Sekutu di Jawa Tengah berjalan lancar. Akan tetapi akibat sikap Belanda yang terus memprovokasi para pemuda pejuang akhirnya timbul pemboikotan dari pihak pemuda.

Pada tanggal 30 Oktober terjadi pertempuran di Semarang dan menjalar ke Magelang, Ambarawa dan tempat-tempat lain. Pasukan pemuda Indonesia dari Yogyakarta, Solo dan sekitarnya menyerbu ke daerah sekitar Magelang dan Ambarawa sehingga pasukan Sekutu terjepit, dalam keadaan terjepit inilah Sekutu mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia yang diwakili oleh Soekarno dan Amir Syarifudin dan pimpinan tentara, dalam perundingan tersebut tercapai kesepakatan bahwa Sekutu diizinkan membawa sejumlah pasukan yang dianggap perlu untuk melindungi tahanan perang yang akan dipindahkan ke Semarang.

Persetujuan yang telah tercapai antara Sekutu dengan Indonesia akhirnya buyar setelah para pejuang di Jawa Tengah mengetahui bahwa di Surabaya terjadi pertempuran besar yakni pada tanggal 10 November 1945, pihak Indonesia tidak percaya lagi kepada

Sekutu, akibatnya pertempuran besar terjadi di Semarang, Magelang, dan Ambarawa antara pihak Sekutu dan Indonesia. Karena tidak mampu menguasai Magelang dan Ambarawa, pasukan Sekutu memutuskan untuk meninggalkan Magelang, mendengar hal tersebut, para pejuang mengepung Ambarawa. Karena kalah dari segi persenjataan akhirnya pasukan Sekutu berhasil membebaskan sekitar 3000 orang tahanan perang dan memindahkannya ke Semarang. Setelah berhasil memindahkan para tahanan tersebut, akhirnya pada bulan November pasukan Sekutu memutuskan untuk meninggalkan Ambarawa. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa pasukan Sekutu hanya tinggal menguasai kota Semarang, sedangkan seluruh daerah Jawa Tengah kecuali Semarang dikuasai oleh pihak Indonesia.

“Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945” (Poesponegoro, 1992:116). Kekuatan pasukan yang ikut bertempur di Ambarawa ini berjumlah 19 batalyon TKR dan beberapa batalyon perjuangan. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan yang berasal dari Purwokerto Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak gugurnya Letnan Kolonen Isdiman, maka Kolonel Sudirman, panglima Divisi di Purwokerto mengambil alih pimpinan pasukan. Berkat kepemimpinan Kolonel Soedirman, pertempuran di Ambarawa berhasil di menangkan dan pasukan Sekutu dapat dipukul mundur ke Semarang sehingga Yogyakarta sebagai tempat kedudukan markas tertinggi TKR dapat diamankan.

“Di Medan, Sumatera Utara, pasukan Sekutu mendarat pada tanggal 9 Oktober 1945. Kekuatan meraka adalah 1 brigade yaitu Brigade-4 dari Divisi India ke-26” (Poeponegoro, 1992:119). Pada awalnya sikap pemerintah RI di Sumatera Utara adalah bekerja sama dengan pasukan Sekutu untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan

tawanan perang yang ada di Medan, akan tetapi karena sikap dan cara yang tidak sopan ditunjukkan oleh pasukan Sekutu terutama yang berasal dari Belanda, maka terjadilah insiden yang mengakibatkan terjadinya pertempuran, bahkan pertempuran tersebut menjaral sampai ke Pematang Siantar dan Berastagi.

Ketegangan kembali tersulut setelah pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly memerintahkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada Sekutu, tentu saja perintah tersebut ditolak. Sebagai akibatnya terjadi pertempuran di berbagai tempat, “Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan markas TKR yang ada di Trepes, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan beberapa truk berhasil dihancurkan dan seorang perwira Inggris terbunuh” (Poesponegoro, 1992:120).

Peristiwa pertempuran yang menewaskan seorang perwira Inggris tersebut membuat pasukan Sekutu kembali mengultimatum kepada para pemuda dan pejuang untuk menyerahkan senjata, dan barang siapa yang tidak menuruti ketentuan ini akan ditembak mati. Daerah yang ditentukan adalah kota Medan dan selapan setengah kilometer dari batas kota Medan dan Belawan. Perlawanan terus memuncak, pada bulan April 1946 tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI ke luar kota Medan. Kantor gubernur, markas Divisi TKR, dan kantor walikota pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan. Walaupun kota Medan berhasil dikusasi oleh Inggris, akan tetapi perlawanan tetap dilakukan oleh para pemuda dan para pejuang untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan.

Di Bandung kekalahan Jepang atas Sekutu, telah mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan antara Indonesia dan Jepang. Pertempuran diawali oleh usaha para

pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (*Artillerie Conctrustive Winkel*, sekarang Pindad). Pertempuran terus terjadi sampai datangnya pasukan Sekutu di kota Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945.

Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, perebutan kekuasaan terjadi pada tanggal 5 Oktober 1945, dimana residen Sumatera Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawainya menaikkan bendera Merah Putih. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh keresidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia, berbeda dengan tempat lainnya di Indonesia, di Palembang perebutan kekuasaan menjelang kedatangan pasukan Sekutu tidak terjadi Insiden, hal ini disebabkan karena orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi insiden tersebut.

D. Usaha Belanda Menguasai Indonesia Setelah Kedatangan Pasukan Sekutu

Kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia yang pada awalnya disambut dengan sikap terbuka oleh rakyat Indonesia berubah menjadi perlawanan-perlawanan sebagai akibat atas tindakan orang-orang NICA yang dianggap meresahkan penduduk. Perlawanan-perlawanan tersebut semakin memuncak setelah pasukan Inggris yang merupakan pasukan inti Sekutu meninggalkan Indonesia karena menganggap tugasnya di Indonesia sudah selesai. Kedudukan pasukan Inggris tersebut diganti oleh tentara NICA yang berasal dari Belanda. Keberadaan orang-orang NICA tersebut semakin mendapat tentangan dan perlawanan akibat ulah mereka yang semakin aktif melakukan teror terhadap rakyat Indonesia.

Tingkah laku orang-orang NICA yang terus melakukan kerusuhan dan teror terhadap rakyat Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan kembali

kekuasaannya di Indonesia, selain itu Belanda ingin mempertahankan *dominasi kolonialismenya* di Indonesia, dan untuk mencapai hal tersebut, Belanda menempuh jalan apa saja, baik jalan militer maupun jalan politik.

Secara politik, Belanda melancarkan provokasi yang mengatakan bahwa, “Di Indonesia tidak ada suatu pemerintahan apapun, kecuali pemerintahan kolonial Belanda yang tetap berkuasa di Indonesia, sedangkan secara militer Belanda aktif memamerkan kekuatannya dengan jalan melakukan tindakan-tindakan teror terhadap rakyat Indonesia” (Nasution, 1983:331).

Sebagai akibat dari bentrokan bersenjata antara Belanda dan Indonesia tersebut, maka atas prakarsa Inggris, masalah kedua belah pihak tersebut akhirnya dibawa ke meja perundingan. Akhirnya setelah melalui proses perundingan yang cukup panjang kedua belah pihak menyetujui suatu perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 10 November 1946, adapun isi perjanjian Linggarjati tersebut adalah :

Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk negara federasi yang bernama Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat tetap mengikatkan diri dalam kerjasama dengan kerajaan Belanda dengan berwadahkan Uni Indonesia Belanda yang ketuanya ratu Belanda (Posponegoro, 1988:108).

Isi perjanjian Linggarjati ini sebenarnya sangat merugikan Indonesia, karena Republik Indonesia nantinya akan merupakan bagian dari Uni Indonesia-Belanda, dimana Uni Indonesia-Belanda itu sendiri akan diketuai oleh Ratu Belanda. Hal ini berarti usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia sudah menampakkan hasil walau tidak secara keseluruhan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang digunakan untuk mengungkapkan fakta atau data. “*Metode* ialah suatu cara yang dipakai dalam data penelitiannya” (Arikunto, 2002:173).

Sedangkan pengertian metodologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *methodos* dan *logos*. *Methodos* yang artinya cara atau jalan, *logos* artinya ilmu atau cara ilmiah yang berhubungan dengan upaya ilmiah. “*Metodologi* ialah suatu cara kerja yang dipergunakan untuk mengadakan penelitian dalam mencapai sesuatu berdasarkan kebenaran secara ilmiah” (Koentjoroningrat, 1985:7).

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitiannya berdasarkan kebenaran secara ilmiah.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Miriam Budiarjo (1989:31), “Pendekatan penelitian dilakukan pada masyarakat setempat apabila dalam masyarakat timbul suatu kelembagaan baru maka nilai-nilai budaya akan mengalami suatu perubahan”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan melalui berbagai disiplin ilmu pengetahuan sosial, yakni sosiologi, politik, ekonomi, dan geografi.

1.1 Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi adalah “Meneliti segi-segi sosial terhadap peristiwa yang dikaji, misalnya golongan mana yang berperan dan mempunyai nilai-nilai yang berhubungan dengan konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan sosial” (Kartodirdjo, 1993:4). Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada sistem, ideologi, dan sosial bangsa Indonesia.

1.2 Pendekatan Ilmu Politik

Pendekatan ilmu politik adalah: “Meneliti dengan berdasarkan pada masyarakat setempat apabila dalam masyarakat muncul kelembagaan baru, maka nilai-nilai budaya akan mengalami perubahan” (Kartodirdjo, 1993:6). Dalam hal ini penulis menekankan pada kehidupan politik rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

1.3 Pendekatan Geografi

Pendekatan geografi adalah “Pendekatan yang mencakup bidang kewilayahan seperti letak, lokasi, kondisi alam, dan wilayah yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia” (Kartodirdjo, 1993:5). Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada letak, lokasi dan kondisi alam Indonesia.

1.4 Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi adalah “Suatu upaya untuk mengetahui masalah ekonomi atau perekonomian suatu daerah atau negara” (Kartodirdjo, 1993:17). Dengan pendekatan ekonomi ini penulis ingin mengetahui bagaimana keadaan perekonomian rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penulisan skripsi yang berjudul “Peranan TNI pada Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta”, adalah termasuk dalam jenis metode penelitian sejarah atau metode historis. Metode sejarah adalah “Suatu metode yang berusaha mengkaji dan menguji kebenaran sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan analisa secara kritis” (Koentjoroningrat, 1985:16).

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis mendatangi beberapa perpustakaan yang banyak menyediakan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Perpustakaan Wilayah Sumatera Selatan
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Perpustakaan Museum Balaputra Dewa Palembang.
4. Perpustakaan Kodam II Sriwijaya Palembang.
5. Perpustakaan Universitas Sriwijaya Palembang

C. Sumber Data

Pada penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan beberapa buku yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, adapun buku-buku yang penulis jadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Engelen, E.O. dkk. 1997. *Lahirnya Suatu Bangsa dan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.

2. Nasution, A.H. 1983, *Sekitar Perang Kemerdekaan, Agresi Militer Belanda Ke- II*, Bandung: Angkasa.
3. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Perjuangan Indonesia Jilid IV*, Jakarta: Balai Pustaka
4. Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. *Peranan TNI Jilid I (1945-1949)*, Jakarta: Markas Besar TNI.
5. Salim, Ismail. 1995. *Terobosan PDRI dan Peranan TNI dalam Perjuangan Politik dan Militer Kemerdekaan Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Untuk lebih jelasnya mengenai sumber data ini, dapat dilihat pada Daftar Rujukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah “Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan karena masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data” (Surakhmad, 1988:211).

Dalam penelitian sejarah, pengumpulan data disebut dengan heuristik, yaitu upaya untuk menelusuri jejak-jejak peristiwa sejarah melalui pengumpulan data-data historis. Sesuai dengan pengertian di atas, maka untuk memperoleh data yang ada relevansinya dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah tehnik kepastakaan. Teknik kepastakaan ialah “Teknik yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti” (Surakhmad, 1988:211). Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat

kualitatif teoritis, sehingga memperkaya data yang diperlukan dalam rangka menganalisa penelitian.

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka dalam penelitian ini penulis mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang penulis anggap dapat memberikan bahan bagi penelitian yang penulis lakukan, perpustakaan tersebut antara lain: Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Kota Palembang, Perpustakaan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Perpustakaan Universitas Sriwijaya Palembang, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang, dan perpustakaan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:245) teknik analisis data adalah “Metode atau cara yang digunakan untuk mengolah suatu data”, sedangkan teknik analisis yang bersifat kualitatif adalah, “Teknik yang menggambarkan data-data dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan” (Arikunto, 2002:245). Jadi teknik analisis data kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh penulis dalam bentuk data-data dan bukan dalam bentuk angka atau bilangan untuk kemudian dipaparkan secara ilmiah.

Dalam penelitian sejarah, teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu kritik sumber (ekstern dan intern), interpretasi, dan historiografi. Adapun uraian mengenai ketiga tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kritik Sumber

Menurut Abdurrahman (1999:59), “Kritik sumber adalah kritik untuk memperoleh keabsahan sumber, dalam hal ini yang juga harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber atau kredibilitas sumber yang ditelusuri melalui kritik intern”. Kritik sumber terdiri dari dua tahap, yaitu: tahap kritik ekstern dan tahap kritik intern. Untuk memperjelas ruang lingkup kedua tahap kritik tersebut, akan dijelaskan secara terpisah, yaitu sebagai berikut:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah “Usaha untuk menguji apakah literatur yang diperoleh telah sesuai sehingga relevan dengan ruang lingkup dan kebutuhan penelitian” (Abdurrahman, 1999:71). Pada tahap ini penulis akan menguji, apakah literatur-literatur yang dikumpulkan akan dapat menunjang kebutuhan penelitian. Hal ini berarti sumber-sumber tersebut terlebih dahulu dipilah-pilah berdasarkan kategori sumber utama (primer) atau sumber penunjang (skunder) yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Kritik Intern

Kritik intern adalah “Usaha untuk mempertanyakan keotentikan data-data yang terdapat pada sumber berdasarkan ciri-ciri fisik dari suatu sumber, seperti ejaan, pola tulisan, bentuk abjad (tulisan) dan tinta yang digunakan” (Abdurrahman, 1999:72). Dari kritik intern inilah akan diketahui kuat tidaknya subjektifitas ataupun kepentingan pengarang terhadap tulisan yang dibuatnya. Untuk maksud tersebut perlu dipertanyakan waktu, tempat dan tokoh yang menulis atau yang membuat suatu sumber, dengan tiga pertanyaan pokok, yaitu: 1) kapan suatu sumber itu dibuat, 2) dimana sumber itu ditulis,

3) siapa yang menulis sumber tersebut. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan di atas diharapkan akan dapat diketahui, apakah sumber yang dimaksud tersebut asli atau palsu ataukah saduran.

2. *Interpretasi Data*

Dalam tahap metode sejarah ini, merupakan usaha untuk menafsirkan jalan cerita sejarah sesuai dengan fakta-fakta dari sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan atau yang telah diperoleh. Menurut Louis Gottschalk dalam Abdurrahman, interpretasi adalah “Penyusunan suatu data yang dapat dipercaya sehingga menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti” (Abdurrahman, 1999:44).

Dalam tahap interpretasi atau penafsiran ini peneliti berusaha untuk merangkai data-data yang telah diperoleh, untuk kemudian ditafsirkan jalan ceritanya sehingga mengandung arti atau bermakna.

3. *Historiografi*

Historiografi merupakan tahap terakhir dari metode historis. Menurut Abdurrahman (1999:67), historiografi adalah “Cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang sudah diadakan, dari penulisan itu akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal sampai akhir”. Jadi pada tahap ini seluruh jalinan kisah sejarah disajikan secara utuh dalam bentuk tulisan skripsi sesuai dengan priode waktu berlangsungnya peristiwa.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib. Pada umumnya setiap alat atau metode pengambilan data

mempunyai panduan pelaksanaan, panduan itu harus dipahami oleh peneliti dan dalam hal penelitian harus menggunakan jasa orang lain untuk mengumpulkan data. Si peneliti harus mempunyai cara untuk memperoleh keyakinan bahwa pengambilan data telah dilaksanakan menurut prosedur yang seharusnya dilakukan.

Cara yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain mencari sumber (*Heuristik*). "*Heuristik* dapat dikatakan sebagai teknik mencari data dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. *Heuristik* adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu oleh karena itu *heuristik* tidak mempunyai peraturan-peraturan umum" (Abdurrahman, 1999:69). *Heuristik* seringkali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci atau mengklasifikasi serta merawat catatan-catatan. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tema penelitian, maka penulis mengumpulkan atau mencari data dari berbagai perpustakaan baik yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang maupun perpustakaan-perpustakaan lainnya.

G. Pengecekan Keabsahan Penelitian

Dalam melakukan pengecekan keabsahan temuan yang diteliti, maka penulis menggunakan langkah-langkah dalam metode penulisan sejarah, antara lain, interpretasi dan kritik sumber, baik kritik intern maupun kritik eksteren.

1. Interpretasi Data

Dalam tahap metode sejarah ini, merupakan usaha untuk menafsirkan jalan cerita sejarah sesuai dengan fakta-fakta dari sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan atau yang telah diperoleh. Menurut Louis Gottschalk dalam Abdurrahman, interpretasi

adalah “Penyusunan suatu data yang dapat dipercaya sehingga menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti” (Abdurrahman, 1999:44).

Pada tahap ini yang penulis lakukan adalah menghubungkan fakta atau data yang satu dengan yang lain yakni fakta-fakta sejarah yang berhubungan dengan peranan TNI pada Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

2. Kritik Sumber

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis kritik sumber, yakni kritik intern dan kritik ekstern, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah “Usaha untuk menguji apakah literatur yang diperoleh telah sesuai sehingga relevan dengan ruang lingkup dan kebutuhan penelitian” (Abdurrahman, 1999:71). Pada tahap ini penulis akan menguji, apakah literatur-literatur yang dikumpulkan akan dapat menunjang kebutuhan penelitian. Hal ini berarti sumber-sumber tersebut terlebih dahulu dipilah-pilah berdasarkan kategori sumber utama (primer) atau sumber penunjang (skunder) yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Kritik Intern

Kritik intern adalah “Usaha untuk mempertanyakan keotentikan data-data yang terdapat pada sumber berdasarkan ciri-ciri fisik dari suatu sumber, seperti ejaan, pola tulisan, bentuk abjad (tulisan) dan tinta yang digunakan” (Abdurrahman, 1999:72). Dari kritik intern inilah akan diketahui kuat tidaknya subjektifitas ataupun kepentingan pengarang terhadap tulisan yang dibuatnya. Untuk maksud tersebut perlu dipertanyakan waktu, tempat dan tokoh yang menulis atau yang membuat suatu sumber, dengan tiga

pertanyaan pokok, yaitu: 1) kapan suatu sumber itu dibuat, 2) dimana sumber itu ditulis, 3) siapa yang menulis sumber tersebut. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan di atas diharapkan akan dapat diketahui, apakah sumber yang dimaksud tersebut asli atau palsu atautkah saduran. Pada tahap ini penulis akan melihat kapan buku-buku yang penulis jadikan acuan dibuat, dimana buku-buku acuan tersebut dibuat, dan siapa yang menulis buku-buku yang penulis jadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Abdurrahman, (1999:72), ada empat tahap kegiatan sehubungan dengan penelitian sejarah, yaitu:

1. Mengumpulkan bahan-bahan tercetak, tertulis atau lisan yang relevan.
2. Menyingkirkan bahan yang tidak otentik.
3. Menyimpulkan kesaksian yang dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik.
4. Menyusun kesaksian yang dapat dipercaya untuk dijadikan cerita yang berarti.

Adapun tahap-tahap yang penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut, yaitu: pertama sekali penulis mengajukan usul dosen pembimbing pada bulan Agustus 2006, selanjutnya pada bulan September-Oktober 2006 penulis mengumpulkan data, pada bulan November penulis mengajukan proposal, pada bulan Desember 2006 penulis mengajukan Bab I, II, dan III, pada Januari 2007 penulis mengajukan Bab IV dan V, dan pada bulan Februari 2007 penulis mengajukan daftar isi, daftar pustaka, kata pengantar, dan abstrak, kemudian yang terakhir pada akhir bulan Februari 2007 jika sesuai dengan rencana maka penulis akan melakukan penjilidan skripsi yang penulis buat ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tahap-Tahap Penelitian

Uraian	Agustus 2006	September - Oktober 2006	November 2006	Desember 2006	Januari 2007	Februari 2007
Usul Judul	√					
Pengumpulan Data		√				
Pengajuan Proposal			√			
BAB I, II, III				√		
Bab IV dan V					√	
Daftar Isi, Daftar Rujukan, Kata Pengantar, dan Abstrak					√	
Penjilidan						√

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aksi Polisionil Belanda Di Indonesia

Aksi polisionil Belanda merupakan tindakan pengamanan yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah pendudukan di Republik Indonesia. Aksi polisionil Belanda tersebut terjadi sebanyak 2 kali, yaitu Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1948.

1. Agresi Militer Belanda I

Agresi Militer Belanda I bukanlah suatu gerakan yang dilakukan secara mendadak, akan tetapi telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari kesiapan pasukan Belanda yang telah dilakukan sejak bulan Maret 1947. Selanjutnya pada bulan Mei 1947 rencana operasi tersebut dimatangkan, dan pada bulan berikutnya pasukan Belanda yang berada di Jawa dan Sumatera sudah siap melaksanakan instruksi serangan.

“Agresi Militer Belanda I ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan nama sandi *Operasi Produk*, yakni operasi yang ditujukan untuk menyerang dan menguasai daerah persawahan, pabrik, dan perkebunan-perkebunan yang dianggap penting oleh Belanda” (Tim Lembaga Analisis Informasi, 2000:20).

Pada tanggal 15 Juli 1947, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat ultimatum dari pihak Belanda agar pasukan Republik Indonesia mengundurkan pertahanannya 10 km dari garis demarkasi di seluruh front, akan tetapi Amir Syarifuddin

tidak memberikan jawaban atas ultimatum tersebut, akibatnya pada tanggal 21 Juli 1947 pasukan Belanda mulai memasuki wilayah Republik Indonesia dari segala penjuru.

Serangan yang dilakukan Belanda ditujukan untuk menguasai kota Yogyakarta yang ketika itu menjadi ibukota negara Republik Indonesia serta untuk menguasai daerah-daerah lain yang dianggap penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan batu bara baik yang terdapat di daerah Jawa maupun di daerah Sumatera. "Usaha ini untuk sebagian berhasil, Belanda berhasil menduduki perkebunan yang cukup luas seperti di Jawa Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan yang dikuasai Belanda tersebut, diharapkan akan dapat terkumpul uang sejumlah \$300 juta, sedangkan biaya agresi militer diperkirakan Belanda akan memakan biaya sebesar \$200 juta, jadi masih ada kelebihan \$100 juta" (Engelen, 1997:278).

Usaha Belanda untuk menguasai daerah perkebunan dan ladang minyak yang terdapat di Jawa dan Sumatera berhasil dilakukan, Akan tetapi untuk tujuan lainnya yakni menguasai ibukota Republik Indonesia tidak berhasil dilakukan, hal ini dikarenakan serangan yang dilakukan Belanda tersebut ternyata menarik perhatian dunia. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1947 atas usul India dan Australia, masalah persengketaan antara Indonesia dengan Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB dan dibahas pada tanggal 31 Juli 1947.

Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan di kedua belah pihak, untuk mengawasi jalannya gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda tersebut dibentuklah suatu Komisi Konsuler yang anggota-anggotanya terdiri dari konsul-konsul jenderal yang ada di Indonesia seperti

Konsul Jenderal Cina, Konsul Jenderal Belgia, Konsul Jenderal Perancis, Konsul Jenderal Inggris, dan Konsul Jenderal Australia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Dr. Walter Foote.

Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler ini melaporkan bahwa, “Sejak tanggal 30 Juli 1947 sampai dengan tanggal 4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer yang terus mendapatkan perlawanan dari pihak Indonesia”. (Poesponegoro, 1992:140). Karena perintah penghentian permusuhan antara Indonesia dan Belanda tidak mencapai hasil yang diharapkan, akhirnya atas usul Amerika Serikat dibentuklah komisi jasa-jasa baik dan baik Indonesia maupun Belanda dipersilahkan memilih salah satu negara untuk mengawasi penghentian tembak menembak tersebut.

Pihak Indonesia memilih Australia menjadi anggota komisi, sedangkan Belanda memilih Belgia, selanjutnya Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat untuk menjadi anggota komisi. “Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Komisi PBB ini selanjutnya lebih dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN)” (Poesponegoro, 1992:140).

Atas prakarsa KTN, maka antara pihak Republik Indonesia dan Belanda mulai melakukan perundingan, perundingan tersebut dilakukan di atas geladak kapal USS *Renville* yang ketika itu sedang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Akhirnya setelah melalui proses perundingan yang cukup panjang, pada tanggal 17 Januari 1948 tercapailah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda, persetujuan tersebut dikenal dengan nama Persetujuan *Renville* yang disaksikan oleh Komisi Tiga Negara.

Adapun isi persetujuan Renville tersebut adalah seperti yang dijelaskan oleh Nasution (1983:76) di bawah ini:

1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang segera harus dibentuk.
2. Sebelum RIS dibentuk Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
3. RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta yang sederajat dengan kerajaan Belanda dalam Uni Indonesia – Belanda dan raja Belanda sebagai kepala uni.
4. Republik Indonesia akan merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
5. Dalam jangka waktu sedikitnya 6 bulan dan selambat-lambatnya 1 tahun supaya diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS.

Akibat dari persetujuan Renville di atas sangat tidak menguntungkan pihak Indonesia yang terus berusaha mempertahankan kemerdekaannya, adapun akibat tersebut antara lain:

1. TNI yang masih berada di daerah Jawa Barat harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia di Jawa Tengah.
2. Menyempitnya daerah kekuasaan Republik Indonesia pasca persetujuan Renville jika dibandingkan dengan daerah kekuasaan Republik Indonesia sebelumnya yang telah disetujui dalam perundingan Linggarjati.
3. Terjadinya pertentangan politik di dalam negeri Indonesia sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil persetujuan Renville, bahkan pertentangan politik tersebut pada akhirnya menjadi pemberontakan.

Sebaliknya di pihak Belanda, hasil persetujuan Renville ini sangat menguntungkan Belanda karena selain dinyatakan bahwa Belanda masih berdaulat atas Indonesia sampai dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), dalam

persetujuan ini pula Belanda dapat menduduki kota-kota besar guna mempersiapkan pasukan dan langkah-langkah selanjutnya guna mengembalikan kekuasaannya di Indonesia.

Walaupun pada dasarnya persetujuan Renville lebih menguntungkan pihak Belanda, akan tetapi pada kenyataannya pihak Belanda tidak merasa puas, Belanda malah mengingkari persetujuan Renville tersebut dan menyatakan tidak terikat lagi pada Persetujuan Renville tersebut, hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya Agresi Militer Belanda II.

2. Agresi Militer Belanda II

Agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947, mengundang perhatian dunia internasional terutama Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian masalah pertikaian Republik Indonesia dengan Belanda, atas inisiatif PBB maka dibentuklah komisi jasa-jasa baik yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan Australia.

Atas prakarsa KTN, maka Republik Indonesia dan Belanda mulai mengadakan perundingan yang bertempat di atas geladak kapal angkut milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok Jakarta. Setelah melalui proses perundingan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948, tercapai suatu persetujuan yang dikenal dengan nama Persetujuan Renville.

Hasil persetujuan Renville di atas ternyata membawa bibit-bibit perpecahan bagi bangsa Indonesia, pihak militer melalui Kepala Staf TNI Jendral Oerip Soemohardjo beranggapan bahwa "Perjanjian yang telah disetujui tersebut merupakan penghinaan

terhadap TNI karena pasukan TNI yang ada harus dipindahkan dari daerah-daerah kantong kekuasaan Republik Indonesia” (Tobing, 1987:24). Sedangkan akibat dari disetujuinya persetujuan Renville tersebut adalah “Jenderal Oerip Soemohardjo mengundurkan diri dari jabatannya, Sedangkan di kalangan sipil menimbulkan bibit perpecahan yang akhirnya mengarah kepada suatu pemberontakan seperti pemberontakan PKI Madiun, dan pemberontakan Darul Islam(DI)/Tentara Islam Indonesia (TII)” (Tim Lembaga Analisis Informasi, 2000:14-15).

Akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa pihak Belanda hanya menyetujui hal-hal yang dianggap menguntungkan dirinya sendiri hal ini terlihat dengan tindakan cepat Belanda untuk menduduki wilayah Republik Indonesia dengan mengadakan pembersihan pada wilayah yang diakui masih berada di bawah kekuasaannya, bahkan pemerintah Republik Indonesia beranggapan bahwa persetujuan Renville ini merupakan siasat Belanda untuk menguasai kembali wilayah Republik Indonesia.

Dengan adanya pernyataan di atas, Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia mulai mengingkari persetujuan Renville tersebut, akibatnya perundingan lanjutan yang diadakan antara Republik Indonesia dengan Belanda selalu mengalami kebuntuan. Hal inilah yang dijadikan alasan utama Belanda untuk mengadakan penyerbuan besar-besaran terhadap Republik Indonesia, akhirnya pada tanggal 18 Desember 1948 dinyatakan bahwa “Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada persetujuan Renville, dan sebagai puncaknya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melaksanakan agresi militer kedua yang ditujukan langsung ke Yogyakarta yang merupakan Ibukota Republik Indonesia” (Engelen, 1997:285).

Serangan Belanda dimulai pada pukul 06.00 WIB, lapangan terbang Maguwo (sekarang bernama Bandara Adi Sucipto) dihujani bom dan martir dari 19 pesawat terbang Belanda. Di pihak Republik Indonesia, pertahanan lapangan terbang Maguwo dilakukan oleh satu kompi pasukan AURI yang dipimpin oleh Kapten Udara Sutoyo Adiputro dengan persenjataan seadanya karena persenjataan lainnya masih banyak yang berada di daerah-daerah setelah digunakan untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ketika itu. Karena jumlah personil dan persenjataan yang kurang memadai, akhirnya lapangan terbang Maguwo berhasil dikuasai oleh Belanda.

Setelah menguasai lapangan terbang Maguwo, Belanda mengirimkan pasukan untuk menguasai kota Yogyakarta. Presiden Soekarno yang ketika itu sedang berada di Yogyakarta mengadakan sidang kabinet untuk menentukan langkah-langkah dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat serangan Belanda tersebut.

Adapun hasil dari sidang kabinet tersebut, antara lain dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:

Sidang kabinet memutuskan untuk memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi, Sumatera Utara untuk mendirikan Pemerintahan Darurat di Sumatera, Mandat lainnya diberikan kepada dr. Sudarsono di India untuk membentuk Pemerintahan Pelarian di luar negeri seandainya usaha yang dilakukan oleh Syafruddin di Sumatera gagal (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:177).

Melalui pertempuran sengit, akhirnya sore hari tanggal 19 Desember 1948, kota Yogyakarta sudah jatuh ke tangan Belanda sedangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menjadi tawanan Belanda. Presiden Soekarno ditawan di Prapat, Sumatera Utara, sedangkan Wakil Presiden Moh. Hatta ditawan di Bangka, tetapi tidak

lama kemudian Presiden Soekarno dipindahkan juga ke Bangka. Sementara itu perlawanan dari rakyat Indonesia masih terus dilakukan baik itu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun oleh rakyat sipil yang turut mengangkat senjata dan melakukan perang secara gerilya.

B. Serangan Umum 1 Maret 1949

Dalam menghadapi pasukan Belanda yang memiliki persenjataan lengkap, perjuangan senjata dilakukan rakyat Indonesia bersama TNI dengan cara melakukan perang gerilya. Perang gerilya merupakan perang yang tidak hanya dilakukan oleh tentara saja, akan tetapi melibatkan seluruh rakyat, perang gerilya terhadap Belanda dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menyerang secara tiba-tiba kedudukan Belanda.

Sebagai puncak dalam perang gerilya dalam menghadapi pasukan Belanda yang terus berusaha merongrong kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, TNI bersama rakyat Indonesia pada tanggal 1 Maret 1949 melakukan serangan terbuka yang lebih dikenal dengan *Serangan Umum 1 Maret 1949*.

Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan secara mendadak dan serentak dengan tujuan menghancurkan kedudukan-kedudukan Belanda. "Pasukan gerilya yang dikerahkan untuk melakukan serangan tersebut berjumlah 2000 orang, terdiri atas satuan TNI, Polisi, Satuan Tentara Pelajar, dan satuan-satuan kelaskaran yang ada ketika itu, pasukan-pasukan tersebut tergabung dalam *Wehrkreise III* (Wk. III Yogyakarta) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto" (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:209-210).

Sandi yang digunakan dalam melaksanakan Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut adalah dengan mengacungkan tangan kiri ke atas disertai dengan ucapan *Mataram* dan dijawab *Menang*, sandi lain yang diharuskan adalah setiap prajurit yang ikut bertempur dalam serangan umum tersebut diwajibkan mengenakan janur kuning yang dipasang di pundak kiri. Dalam serangan mendadak yang dilakukan oleh pasukan TNI dengan dibantu oleh rakyat, akhirnya kedudukan Belanda di Yogyakarta dan tempat lainnya seperti lapangan terbang Maguwo dan Benteng Vredenburg berhasil dikuasai oleh pihak Indonesia.

Mendengar kekalahan yang dialami dalam serangan mendadak tersebut, Belanda bermaksud membalasnya dengan mengirimkan pasukan bantuan yang didatangkan dari luar kota Yogyakarta. Akan tetapi ketika pasukan Belanda datang ke Yogya dan daerah-daerah yang sempat diduduki oleh pihak Indonesia, pasukan Belanda tidak lagi menjumpai pasukan dalam jumlah besar, hal ini terjadi berkat siasat yang dilakukan oleh Indonesia saat itu. "Sesuai dengan ketentuan dari pimpinan komando Letnan Kolonel Soeharto, menjelang pukul 13.00 seluruh pasukan mulai meninggalkan daerah-daerah yang berhasil mereka duduki, hal ini dilakukan untuk menghindari serangan balasan yang mungkin akan dilakukan secara besar-besaran oleh Belanda" (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:212). Walaupun hanya sesaat menduduki kota Yogyakarta dan sekitarnya, akan tetapi Indonesia telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan untuk melawan dan menghadapi Belanda.

1. Tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 berhasil menduduki kota Yogyakarta, walaupun hanya berlangsung lebih kurang 6 jam, akan tetapi serangan umum tersebut telah berhasil mencapai tujuannya, adapun tujuan dari serangan umum tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Tujuan Militer

Secara militer serangan yang dilakukan oleh TNI bersama rakyat bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih utuh, masih merupakan satuan yang tertib, teratur dan disiplin serta mampu mengadakan perlawanan secara terkoordinasi dan terkonsentrasi. Selain itu serangan umum ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa kekuasaan Belanda di Yogyakarta tidak berpengaruh terhadap tekad dan kesetiaan TNI, malah sebaliknya, kekuatan dan pengaruh TNI secara *de jure* dan *de facto* sangat besar.

(2) Tujuan Politik

Tujuan secara politik adalah mendukung perjuangan perwakilan Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang ketika itu dipimpin oleh Lambert Nico Palar. Dimana ketika itu Belanda menyatakan bahwa aksi polisionil yang dilakukan Belanda di Indonesia telah berhasil karena TNI dan kekuatan senjata lainnya telah berhasil dihancurkan dan situasi di Yogyakarta telah kembali normal.

(3) Tujuan Psikologis

Secara psikologis, Serangan Umum 1 Maret 1949 bertujuan untuk mengobarkan semangat juang rakyat dan TNI serta untuk memulihkan, memupuk, dan

meningkatkan kepercayaan rakyat kepada TNI. Oleh karena itu Serangan Umum 1 Maret 1949 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perjuangan dan pejuang di seluruh tanah air untuk meningkatkan semangat guna melakukan perlawanan terhadap Belanda dan semua kekuatan asing yang mencoba menginjak kedaulatan Republik Indonesia.

Sesuai dengan tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949 seperti yang telah penulis uraikan di atas, dapat dilihat bahwa dari ketiga tujuan yang hendak dicapai melalui Serangan Umum 1 Maret 1949, tujuan politiklah yang lebih dominan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan serangan umum itu sendiri yakni menduduki kota Yogyakarta dan wilayah yang dikuasai Belanda hanya selama lebih kurang 6 jam dengan tujuan untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa TNI masih ada dan selalu didukung oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu serangan umum yang dilakukan bukanlah bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Belanda secara fisik. Tujuan militer secara otomatis tercapai apabila serangan umum yang dilakukan berhasil, sedangkan tujuan psikologis pada hakikatnya merupakan hasil dari tujuan militer dan tujuan politik bahkan kedua tujuan tersebut dapat saling menunjang.

2. Dampak Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bekerjasama dengan seluruh kekuatan rakyat ternyata membawa dampak yang sangat luas, khususnya perhatian dunia internasional, dunia internasional semakin bersimpati dan memberikan dukungan moril terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

Dengan dilaksanakannya Serangan Umum tersebut, posisi Belanda dalam gelanggang politik internasional semakin tertekan. Belanda yang pada awalnya selalu memprovokasikan agresi terhadap Republik Indonesia merupakan tindakan polisionil ternyata tidak dapat dibenarkan, bahkan dunia internasional beranggapan bahwa tindakan agresi yang selama ini dikatakan tindakan untuk mengamankan daerah pendudukan di Indonesia hanya sebagai siasat agar tidak mendapat kecaman dari dunia internasional.

Serangan Umum 1 Maret 1949 ini berdampak pada semakin simpatinya dunia internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Hal ini berarti bahwa keunggulan yang dimiliki Belanda dalam bidang persenjataan dan peralatan perang tidak dapat mendukung keberadaannya di Indonesia, bahkan secara umum Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut telah berhasil mencapai tujuannya baik secara militer, politik maupun secara psikologis.

Dampak positif di bidang psikologis yang dirasakan sebagai akibat dari Serangan umum 1 Maret 1949 adalah "Dengan semakin tebalnya semangat nasionalisme dan kepercayaan rakyat Indonesia kepada kekuatan TNI untuk melindungi dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari segala ancaman yang datang, baik ancaman yang datang dari luar maupun ancaman yang datang dari dalam negeri sendiri" (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:226)

Sedangkan *dampak positif di bidang politik* yang dirasakan sebagai akibat dari Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah "Semakin simpatinya dunia internasional atas perjuangan bangsa Indonesia, hal ini dapat dilihat dari diadakannya konferensi

pendahuluan yang membahas masalah Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1949 di New Delhi, India. Hasil dari konferensi tersebut adalah dengan disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan gencatan senjata kepada kedua belah pihak” (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:227).

C. Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta

Dalam menjalankan Serangan Umum 1 Maret 1949, dapat dilihat begitu baiknya koordinasi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dengan seluruh unsur-unsur yang terlibat langsung dalam serangan umum tersebut. Dimana setelah berhasil menduduki kota Yogyakarta selama lebih kurang enam jam, para gerilyawan dan seluruh anggota pasukan TNI sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh komandonya masing-masing segera meninggalkan kota, dan dalam waktu singkat kota Yogyakarta menjadi sunyi kembali, akibatnya ketika pasukan Belanda kembali untuk melakukan pembalasan hanya ditemukan beberapa orang gerilyawan yang melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam peristiwa ini pula dapat dilihat bahwa dengan perlengkapan senjata yang masih sederhana dan bersifat seadanya jika dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki pasukan Belanda, pasukan TNI yang dibantu oleh para gerilyawan berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam peristiwa ini pula terlihat bukti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat yang memiliki semangat juang tinggi serta rasa nasionalisme yang tidak diragukan lagi.

1. Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan Tindakan Ofensif TNI

Serangan Umum 1 Maret 1949 ini merupakan tindakan ofensif yang diprakarsai oleh TNI dengan dibantu oleh para pelajar dan sukarelawan. Dengan kekuatan kurang lebih 3.000 personil, TNI menyerang kedudukan Belanda di Yogyakarta. Tindakan ofensif tersebut dilakukan karena Belanda telah mengingkari persetujuan gencatan senjata, bahkan Belanda juga telah menahan para pemimpin Republik Indonesia dan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia beserta TNI telah dapat dihancurkan dan tidak ada lagi kekuatan militer yang dapat melindungi bangsa Indonesia.

Tindakan ofensif yang dilakukan oleh TNI ini memang tidak ditujukan untuk mengalahkan dan menghancurkan kekuatan Belanda di Indonesia, akan tetapi ditujukan hanya untuk membuat kacau pertahanan musuh sebagai akibat serangan yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut. Setelah pertahanan Belanda mulai melemah, maka TNI dengan dibantu para sukarelawan dan pelajar dapat leluasa menekan musuh dan memukul mundur pasukan Belanda.

Tindakan ofensif tersebut dilakukan TNI atas dasar pengalaman TNI dalam peristiwa agresi militer Belanda I pada tahun 1947, dimana siasat yang digunakan ketika itu adalah *sistem bumi hangus*, maksudnya setiap daerah yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh TNI dari serangan Belanda segera dibakar dan dihancurkan dengan maksud supaya Belanda tidak mendapatkan apa-apa dari serangan tersebut, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya sistem bumi hangus tersebut tidak lagi diterapkan oleh TNI dalam melakukan serangan untuk membalas agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Adapun alasan TNI tidak lagi menerapkan sistem bumi hangus tersebut

didasarkan atas pertimbangan bahwa posisi Belanda yang akan diserang berada di ibukota negara yakni Yogyakarta, sehingga jika sistem bumi hangus masih dilaksanakan, maka bangsa Indonesia sendiri yang akan mengalami kerugian sebagai akibat dari hancurnya fasilitas-fasilitas yang terdapat di sana.

Dengan keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 memukul mundur pasukan Belanda dari ibukota Yogyakarta dan sempat mendudukinya selama lebih kurang 6 jam, dunia internasional dapat mengetahui kebohongan yang selama ini disebarluaskan Belanda, bahwa Republik Indonesia telah hancur dan tidak ada lagi kekuatan militer yang dapat melindungi Republik Indonesia dari segala ancaman. Dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 itu pula TNI menunjukkan bahwa TNI masih tetap ada dan didukung oleh segenap rakyat Indonesia.

Tindakan ofensif yang dilakukan oleh TNI dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 ini juga menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia dapat terus tegak dan dipertahankan apabila diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan mendapat dukungan rakyat dan tidak selalu menunggu perjuangan yang dilakukan dalam bentuk diplomasi yang telah terbukti sering mengalami kebuntuan dan kemacetan yang disengaja oleh pihak Belanda.

2. TNI merupakan Pengatur Siasat Perang Gerilya

Dalam melaksanakan Serangan Umum 1 Maret 1949, TNI menerapkan siasat perang gerilya yang telah mulai dilakukan semenjak Belanda melakukan agresi militernya, adapun pengertian siasat perang gerilya ini dijelaskan pada kutipan dibawah ini:

Siasat gerilya adalah siasat perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk memaksa musuh tersebar kemana-mana dan mengikat musuh sebanyak mungkin, melelahkan serta memeras darah dan keringat sebanyak mungkin, sekaligus menggoncangkan urat syaraf. Siasat ini dilakukan dengan tujuan hanya untuk mengacau konsentrasi lawan dan bukan untuk mengalah dan menghancurkan lawan secara keseluruhan (Nasution, 1983:37).

Perang gerilya merupakan perang rakyat semesta, karena dalam perang tersebut seluruh kekuatan melibatkan diri didalamnya dengan sukarela untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perang gerilya berpangkal pada kekuatan rakyat yang sekaligus sebagai basis dari kekuatan terpadu.

Perang gerilya berbeda dengan bentuk-bentuk perang lainnya, dalam perang secara umum kita mengenal adanya *basis* atau *daerah pangkalan*, kemudian *daerah pertempuran*, serta *daerah operasi* atau *areal pertempuran*. Akan tetapi daerah-daerah seperti ini tidak terdapat dalam peragaan perang gerilya, karena dalam perang gerilya yang dikenal adalah *sistem kantong-kantong*, yaitu suatu sistem yang daerah pertahanannya terdapat di desa-desa atau daerah pegunungan.

Perbedaan perang gerilya dengan perang lain yang tidak menerapkan sistem atau siasat gerilya adalah terdapat pada sistem peperangan yang dilakukan pada satu jurusan saja, akan tetapi dalam perang gerilya daerah-daerah kantong tersebut dapat melakukan serangan ke semua jurusan karena daerah pangkalannya adalah perkampungan rakyat, jadi peperangan tidak hanya terfokus pada satu tempat saja tetapi dapat dilakukan pada beberapa tempat secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba. Selain itu gerakan pasukan gerilya biasanya dilakukan dalam kesatuan-kesatuan kecil di malam hari dengan tujuan untuk mengganggu pasukan musuh. Gerakan pasukan gerilya ini terbukti efektif untuk menimbulkan gangguan bagi musuh, akan tetapi tidak mendukung perjuangan yang

dilakukan secara diplomasi. Hal ini dikarenakan perang gerilya yang dilakukan oleh TNI dianggap Belanda hanya sebagai gerakan pengacau keamanan dan pembuat teror saja.

Siasat perang gerilya menjelang dilaksanakannya Serangan Umum tanggal 1 Maret 1949 ini dimulai dengan melakukan serangan-serangan terhadap tentara Belanda yang berada pada garis-garis komunikasi. Para gerilyawan memutuskan kawat-kawat telepon, merusak jalan kereta api serta menyerang konvoi-konvoi Belanda yang lewat, "Akibat serangan tersebut Belanda merubah siasatnya yaitu dengan cara memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki" (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:284).

Diperbanyaknya pos-pos Belanda tersebut ternyata memberikan keuntungan pula bagi para pejuang, hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya pos-pos tentara Belanda, maka kekuatan mereka menjadi terpecah-pecah. Kekuatan Belanda terpecah pada ribuan pos-pos kecil di seluruh daerah, hal ini dengan sendirinya menjadikan semakin luasnya medan gerilya yang harus dihadapi oleh pasukan Belanda.

Setelah merasa pasukan Belanda terganggu dan tidak lagi terkonsentrasi di ibukota, TNI dengan dibantu para pejuang dan sukarelawan mulai memikirkan untuk menyerang Ibukota yang dijadikan tempat konsentrasi pasukan Belanda, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1949 dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto yang merupakan Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III yang membawahi Yogyakarta, secara serentak di Yogyakarta dilakukan serangan besar-besaran dengan tujuan memukul mundur pasukan Belanda dari ibukota Yogyakarta.

3. TNI merupakan Pusat Komando Serangan Umum 1 Maret 1949

Demikian mengenai gambaran perang gerilya, yang diperagakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948 dan sebagai puncak aksi gerilya tersebut, TNI melancarkan ofensif penyerangan, yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949 yang merupakan pagelaran perang gerilya.

Walaupun demikian, tidak berarti rakyat melakukan serangan secara sembarangan dan sendiri-sendiri, akan tetapi seluruh serangan yang telah dan akan dilakukan tetap dikoordinasikan oleh komando perang gerilya itu sendiri, karena dalam suasana semangat revolusi dan nasionalisme yang menyala-nyala, tetap dibutuhkan suatu organisasi yang tertib untuk mengatur bantuan rakyat, dan mengatur menyalurkan perjuangan rakyat. Ini hanya bisa dengan melalui pimpinan-pimpinan rakyat yang diakuinya. Mempergunakan saluran-saluran yang telah hidup dan diakui di tengah-tengah rakyat

Jelaslah bahwa dalam perang gerilya masih tetap diperlukan adanya suatu koordinasi dalam penyerangan walaupun serangan dapat dilakukan ke semua jurusan, secara tiba-tiba dan sembunyi-sembunyi, akan tetapi komando serangan tetap dipegang oleh TNI.

Perang gerilya yang dilancarkan semasa aksi militer II Belanda yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948 itu merupakan pelaksanaan daripada perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman, agar TNI meneruskan perjuangan perang gerilya semasa perang kemerdekaan, khususnya pada puncak perang gerilya yakni Serangan Umum 1

Maret 1949 yang merupakan reaksi atas ditangkap serta ditahannya para pimpinan Republik Indonesia.

Dengan adanya komando yang teratur serta dipatuhi oleh segenap bawahan dan seluruh orang yang terlibat dalam serangan umum tersebut, maka keberhasilan serangan Umum 1 Maret 1949 dapat dicapai.

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 ini dapat dilihat pula dari dampak di bidang politik yang dirasakan sebagai akibat dari Serangan Umum 1 Maret 1949 yakni semakin simpatinya dunia internasional atas perjuangan bangsa Indonesia, sehingga atas usul India diadakanlah konferensi pendahuluan yang membahas masalah Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1949 di New Delhi, India. Adapun hasil dari konferensi tersebut adalah dengan disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan gencatan senjata kepada kedua belah pihak.

Selain resolusi Dewan Keamanan PBB, Belanda juga mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat yang menuntut dihentikannya permusuhan, pengembalian pemimpin Indonesia yang ditawan, dan menugaskan kepada KTN untuk membuat laporan tentang situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948, Amerika Serikat juga mengancam untuk menghentikan bantuan ekonominya kepada Belanda jika Belanda tidak mematuhi resolusi tersebut.

Karena banyaknya tekanan dari dunia internasional, maka Belanda memutuskan untuk kembali ke meja perundingan. Salah satu perundingan yang dilaksanakan adalah perundingan Roem-Royen yang menghasilkan keputusan sebagaimana yang dijelaskan oleh Poesponegoro (1992:169) berikut ini:

1. Pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949, Keresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda dan pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu.
2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
3. Konferensi Meja Bundar akan diadakan di Den Haag.

Sebagai tindak lanjut dari perundingan Roem-Royen, maka sejak tanggal 24 Juni 1949 pasukan Belanda mulai di tarik dari kedudukannya di Yogyakarta. Penarikan pasukan tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 29 Juni 1949.

Setelah perundingan Roem-Royen, Republik Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, sebagai persiapan, pada tanggal 6 Agustus 1949 delegasi RI dibawah pimpinan Wakil Presiden Moh. Hatta berangkat ke Nederland (Belanda) untuk menghadiri KMB. "Khusus masalah pertahanan, pemerintah mengangkat Kolonel Simatupang untuk mengepalai delegasi militer" (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:220).

Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, akhirnya disepakati hal-hal pokok di bidang militer seperti yang dijelaskan pada kutipan dibawah ini:

Persoalan-persoalan mengenai kemeliteran akhirnya mencapai titik temu, yakni tentara Belanda akan dikumpulkan pada suatu tempat dan masalah keamanan sejak dikumpulkannya tentara Belanda tersebut menjadi tanggung jawab Republik Indonesia, serta penarikan pasukan Belanda dari Indonesia akan dilakukan paling lama enam bulan. (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:221).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa Belanda mulai meninggalkan Indonesia sejak dilakukannya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda yakni pada bulan Desember 1949 sebagai salah satu perwujudan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi yang berjudul "Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI Pada Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta", yaitu sebagai berikut:

1. Aksi Polisionil Belanda merupakan tindakan pengamanan yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah pendudukan di Republik Indonesia. Aksi Polisionil Belanda tersebut terjadi sebanyak 2 kali, yaitu Aksi Polisionil Belanda I/Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan Aksi Polisionil Belanda II/Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1948.
2. Sebagai puncak dalam perang gerilya dalam menghadapi pasukan Belanda yang terus berusaha merongrong kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, TNI bersama rakyat Indonesia pada tanggal 1 Maret 1949 melakukan serangan terbuka yang lebih dikenal dengan *Serangan Umum 1 Maret 1949*. Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan secara mendadak dan serentak dengan tujuan menghancurkan kedudukan-kedudukan Belanda dan menduduki kota Yogyakarta walau hanya 6 jam.
3. Peranan TNI pada Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta adalah tindakan ofensif TNI, TNI merupakan pengatur siasat perang gerilya dan TNI merupakan Pusat Komando Serangan Umum 1 Maret 1949. Akhirnya, Belanda mulai meninggalkan Indonesia sejak dilakukannya pengakuan kedaulatan republik

Indonesia Serikat oleh Belanda yakni pada bulan Desember 1949 sebagai salah satu perwujudan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

B. Saran

1. Kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan hendaknya terus menggali dan mempelajari peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau karena akan sangat bermanfaat untuk menjadi pedoman dan pegangan pada masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat umumnya dan para peminat sejarah khususnya diharapkan dapat mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu.
3. Bagi pemerintah khususnya pihak perpustakaan wilayah Sumatera Selatan hendaknya lebih melengkapi bahan bacaan dan fasilitas lain mengenai sejarah umumnya dan khususnya tentang sejarah perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Budiarjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Engelen, E.O. dkk. 1997. *Lahirnya Suatu Bangsa dan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode Penelitian dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, A.H. 1983, *Sekitar Perang Kemerdekaan, Agresi Militer Belanda Ke- II*, Bandung: Angkasa.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Perjuangan Indonesia Jilid IV*, Jakarta: Balai Pustaka
- Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. *Peranan TNI Jilid I (1945-1949)*, Jakarta: Markas Besar TNI.
- Salim, Ismail. 1995. *Terorisan PDRI dan Peranan TNI dalam Perjuangan Politik dan Militer Kemerdekaan Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sekretariat Negara, 1988. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1965*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Simatupang, T.B. 1981. *Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Surakhmad, Winarno, 1988. *Dasar-Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Tim Lembaga Analisis Informasi. 2000, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Pressindo.

LAMPIRAN

Ace
10/06
11

Ace
15/07
12

RANCANGAN PENELITIAN

PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) PADA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 DI YOGYAKARTA

A. Latar Belakang

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih menganggap bahwa dirinya tetap berdaulat atas Indonesia, sehingga perjuangan bangsa Indonesia kala itu terbagi menjadi dua bagian, yakni: "Perjuangan keluar untuk memperoleh pengakuan terhadap adanya suatu negara Republik Indonesia yang meliputi seluruh tanah air Indonesia, dan perjuangan ke dalam untuk menegakkan susunan ketatanegaraan yang baru yang berpedoman kepada Pancasila" (Simatupang, 1981:183).

Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Sekutu mendarat secara besar-besaran. "Seluruhnya berjumlah 30 batalyon, tersebar di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, dan Padang, sebagai pimpinan pasukan Sekutu adalah Letnan Jenderal Philips Christians" (Engelen, 1997:174).

Kedatangan pasukan Sekutu yang didalamnya terdapat orang-orang Belanda menjadikan awal kehidupan Republik Indonesia ditandai dengan suasana yang mencekam, hal tersebut disebabkan oleh perbuatan orang-orang NICA (*Netherland Indiische Civil Administration*) yang bergabung dalam pasukan Sekutu tersebut semakin hari semakin membuat suasana tegang antara para pejuang di masa kemerdekaan dengan

tentara NICA terutama yang berasal dari Belanda. Tentara NICA tidak segan-segan melakukan teror sehingga menimbulkan kemarahan di pihak Indonesia yang sejak awal sudah mencurigai maksud kedatangan tentara NICA ini.

Tujuan kedatangan orang-orang NICA pada awalnya sama dengan tujuan kedatangan tentara Sekutu di Indonesia, karena sejak awal orang-orang NICA yang datang ke Indonesia hanya sebagai pegawai sipil Sekutu yang bertugas membantu kelancaran tugas tentara Sekutu di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya orang-orang NICA tersebut menggunakan kesempatan ini untuk menyusun kembali kekuatannya guna berusaha mengembalikan kekuasaannya di bumi Indonesia yang pernah tertanam selama hampir tiga setengah abad lamanya sejak kedatangannya pada tahun 1596 (Engelen, 1997:162).

Sebagai suatu negara yang baru merdeka dalam situasi dunia yang tidak menentu akibat terjadinya perang dunia, Republik Indonesia terus menerus menghadapi cobaan yang bertujuan merongrong kekuasaan dan kedaulatan negara sehingga dibutuhkan suatu angkatan perang yang mampu melawan dan melindungi bangsa Indonesia dari setiap tindakan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Seperti halnya negara lain di dunia, Republik Indonesia memiliki angkatan perang yang pada awal berdirinya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Mengenai sejarah singkat terbentuknya TNI dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:

“Sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian nama tersebut mengalami perubahan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), selanjutnya dari TKR berubah kembali menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI), akhirnya nama tersebut berubah

menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)” (Tim Lembaga Analisis Informasi, 2000:3).

Belanda yang sejak awal terus menganggap dirinya masih berkuasa di Indonesia sering melakukan tindakan yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan terhadap daerah pendudukan. Tindakan pengamanan tersebut merupakan agresi bagi bangsa Indonesia karena nyata-nyata telah merongrong kewibawaan dan kekuasaan Republik Indonesia, adapun agresi militer Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 27 Juli 1947 dengan mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di darat, laut dan udara. Pendaratan pasukan dilakukan di Panarukan Jawa Timur, akan tetapi agresi militer tersebut mendapatkan perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. “Rakyat menghadang gerak maju pasukan Belanda serta menyerang setiap kendaraan Belanda yang berusaha memasuki keresidenan Besuki dan Malang Jawa Timur, perlawanan terhadap Belanda terus dilakukan baik secara terang-terangan ataupun secara gerilya” (Salim, 1995:24).

Agresi militer Belanda yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948 ditujukan untuk menguasai Republik Indonesia yang ketika itu beribukota di Yogyakarta merupakan puncak dari aksi polisionil Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Agresi tersebut dilancarkan ketika bangsa Indonesia sedang berada pada kondisi yang belum pulih akibat terjadinya pemberontakan PKI di Madiun, sebagai akibatnya pasukan Belanda berhasil menduduki ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta.

Berbagai reaksi dari dunia internasional bermunculan atas Agresi Militer Belanda II tersebut, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru yang berkata bahwa, “Di Indonesia telah terjadi agresi yang paling

tidak kenal malu dan kita menyesalkan bahwa sikap beberapa negara yang ternyata secara diam-diam menyetujui atau bahkan menerima dengan baik agresi yang dilakukan Belanda tersebut dengan alasan solidaritas sesama anggota Uni Barat” (Nasution, 1983:132).

Selain kecaman yang berasal dari Perdana Menteri India di atas, kecaman lainnya juga datang dari Liga Arab, hal ini dapat dilihat dari pernyataan sekretarisnya Abdurrahman Azam Phaza sebagai berikut:

Negara-negara Arab pun menyatakan simpatinya atas perjuangan Republik Indonesia, Liga Arab akan meminta kepada para anggotanya untuk menyokong perjuangan yang dilakukan oleh Republik Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB dan berjanji tidak akan mengakui suatu pemerintahan apapun yang didirikan oleh Belanda di Indonesia.. (Nasution, 1983:411).

Selain itu, Liga Arab melalui sekretarisnya mengajak negara-negara anggota Liga Arab untuk mendukung dan membantu perjuangan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah pada hakekatnya tidak pernah mengakui suatu bentuk pemerintahan apapun yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Pernyataan simpati yang disampaikan oleh Perdana Menteri India merupakan pernyataan perasaan simpati yang sangat mendalam, hal ini didasari oleh perasaan senasib seperjuangan sebagai bangsa di rumpun Asia yang ingin membebaskan diri terhadap segala bentuk ancaman terhadap negaranya.

Dukungan dan simpati tersebut merupakan modal bagi perjuangan fisik bangsa Indonesia dalam menghadapi pasukan Belanda, baik itu perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1949, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memutuskan untuk melakukan serangan umum dengan tujuan utama merebut kembali ibukota negara di Yogyakarta (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:208).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap kembali peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada serangan umum 1 Maret 1949.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimanakah Aksi Polisionil Belanda di Indonesia?
2. Bagaimanakah terjadinya serangan umum 1 Maret 1949?
3. Bagaimanakah peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta?

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini tidak menyimpang dari tema yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada *scope spatial* (tempat) yakni di daerah Yogyakarta, sedangkan untuk *scope temporal* (waktu) penulis membatasi sampai dengan tahun 1949.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aksi polisionil Belanda di Indonesia
2. Untuk mengetahui terjadinya serangan umum 1 Maret 1949
3. Untuk mengetahui peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada serangan umum 1 Maret 1949.

E. Kegunaan Kajian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang akan mengkaji lebih lanjut tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya mengenai serangan umum 1 Maret 1949.
2. Dapat menjadi bahan masukan bagi para pecinta sejarah khususnya sejarah negara Republik Indonesia.

F. Definisi Isilah

1. *GYUGUN* : Pasukan yang dibentuk dan dilatih oleh tentara Jepang
2. *LIGA ARAB* : Suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara Arab yang terletak di kawasan Timur Tengah.
3. *PKI* : Partai Komunis Indonesia, suatu partai yang berhaluan komunis serta bertujuan mengganti ideologi negara Republik Indonesia dengan faham komunis
4. *SERANGAN UMUM* : Serangan yang dilakukan serentak dan bersama-sama dengan tujuan untuk merebut kembali Yogyakarta

5. *TNI* : Tentara Nasional Indonesia, merupakan suatu organisasi militer yang bertugas menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

G. Kajian Pustaka

1. Kehidupan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, kehidupan rakyat Indonesia baik bidang politik maupun bidang ekonomi belum stabil. Dalam bidang politik Republik Indonesia belum mendapatkan pengakuan kedaulatan baik dari Sekutu maupun dari Belanda sehingga perjuangan untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di bidang politik terus dilakukan. Di bidang ekonomi, pemerintah Republik Indonesia dihadapkan pada permasalahan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, seperti: laju inflasi yang sangat tinggi serta blokade laut yang dilakukan Belanda dengan tujuan untuk memperparah kondisi ekonomi Republik Indonesia.

1.1 Kehidupan Politik

Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia mulai menentukan kebijakannya terutama politik luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia mulai merintis hubungan dengan luar negeri. Secara formal hubungan tersebut dilakukan secara bilateral antara Republik Indonesia dengan Belanda. Hubungan tersebut menjadi berkembang sesudah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut campur.

Keterlibatan PBB untuk membahas masalah RI, dimulai dengan usul utusan Republik Sosialis Ukraina pada tanggal 21 Januari 1946. PBB diminta untuk campur tangan, karena ternyata tentara Inggris yang bertugas di Indonesia telah menggunakan tentara Jepang untuk menindas gerakan rakyat Indonesia” (Poesponegoro, 1988:135).

Penindasan terhadap rakyat Indonesia tersebut merupakan suatu ancaman terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, hal ini dikarenakan perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap segala bentuk penindasan dapat menimbulkan peperangan terbuka yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Akhirnya atas peran serta PBB melalui jasa Komisi Tiga Negara (KTN), tercapailah persetujuan Renville. Bahkan atas peranan politik luar negeri Republik Indonesia itu pula maka pada suatu konferensi yang dilaksanakan di New Delhi India, dihasilkan suatu keputusan yang menuntut untuk dipulihkannya Republik Indonesia seperti semula. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Karena peserta Konferensi di New Delhi tersebut merupakan suatu unsur yang cukup besar dalam lingkungan PBB maka Dewan Keamanan PBB memberikan perhatian yang besar atas keputusan konferensi tersebut.

Akhirnya pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan keamanan PBB mengeluarkan suatu resolusi seperti yang dijelaskan oleh Marwahti Djoened Posponegoro (1992:139) yang antara lain berbunyi:

1. Segera melakukan gencatan senjata, dan
2. Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta (Posponegoro, 1988:139).

Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut menentukan pula dengan jelas garis-garis dan jangka waktu penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda ke pihak Indonesia. Keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk menarik perhatian dunia atas nasib bangsa Indonesia tersebut tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia yang dilaksanakan secara jujur, damai dan bersedia berunding untuk menyelesaikan masalah atas prinsip-prinsip Indonesia merdeka serta bersedia berperang untuk membela diri apabila diserang.

1.2 Kehidupan Ekonomi

Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia sangat kacau, inflasi yang berlebihan menimpa Indonesia. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali bahkan peredaran mata uang Jepang di masyarakat diperkirakan sejumlah 4 milyar. "Pada bulan Agustus 1945, mata uang Jepang yang beredar di Jawa saja mencapai 1,6 milyar, jumlah ini bertambah lagi ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank" (Poesponegoro, 1992:172).

Pemerintah Indonesia sendiri tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi hal tersebut, hal ini dikarenakan pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku lagi karena pemerintah Republik Indonesia sendiri belum mempunyai mata uang sebagai penggantinya. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat kecil, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.

Selain dari kesulitan yang muncul akibat inflasi tersebut, penderitaan rakyat semakin bertambah ketika Belanda melakukan blokade laut. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Republik Indonesia, tindakan blokade ini dimulai pada bulan November 1945, akibat blokade ini barang-barang dagangan pemerintah Republik Indonesia tidak dapat di ekspor ke luar negeri.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesulitan di bidang ekonomi tersebut adalah dengan mengeluarkan uang kertas baru yang bernama *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI) untuk menggantikan mata uang Jepang (Poesponegoro, 1992: 175). Selain itu, pada tanggal 1 November 1946 pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia yang bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Situasi negara yang sedang dilanda perang sangat mempengaruhi situasi ekonomi, pendapatan pemerintah semakin tidak sebanding dengan pengeluaran. Hasil produksi perkebunan dan pertanian sebagian besar tidak dapat diekspor secara normal karena blokade yang dilakukan oleh Belanda. Dengan demikian penghasilan pemerintah semata-mata hanya bergantung dari produksi petani, akan tetapi berkat dukungan seluruh rakyat Indonesia pemerintah Republik Indonesia berhasil bertahan dalam situasi ekonomi yang sedang kacau tersebut.

2. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Sesuai dengan ketentuan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 maka seluruh alat-alat negara seperti pamongpraja, kepolisian, tentara PETA (Pembela Tanah Air) menjadi

perlengkapan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya antara lain, “Menegaskan bahwa Republik Indonesia telah berdiri sehingga perlu dibentuk tentara bernama Badan Ketentaraan Rakyat, dan sebagai intinya ditunjuk orang-orang bekas PETA, *Heiho* dan *Gyu Gun*” (Engelen, 1997:99), maka dengan spontan didirikanlah BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang anggotanya berintikan tentara PETA, *Heiho* dan *Gyu Gun* (pasukan bentukan Jepang) yang telah cukup terlatih di seluruh wilayah Republik Indonesia (Engelen, 1997:99). Adapun alasan para pemimpin Republik Indonesia pada saat itu membentuk angkatan bersenjata dengan nama BKR adalah untuk menghindari salah paham dari pihak Jepang, karena sesuai dengan namanya BKR hanya sebagai sebuah badan yang mempunyai tugas untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan rakyat semata sesuai dengan kondisi di Indonesia pada waktu itu.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 nama BKR kemudian diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang bermarkas besar di Yogyakarta dan pada tanggal 20 Oktober 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat pucuk pimpinan Kementerian Keamanan Rakyat seperti yang dikutip dari Pusat Sejarah dan Tradisi TNI (2000:18), adapun pucuk pimpinan TNI tersebut terdiri atas:

Menteri Keamanan Rakyat ad interim : Muhammd Sulyoadi Kusumo
Pimpinan tertinggi TKR : Supriadi
Kepala Staf Umum : Mayor Oerip Sumohardjo

Akan tetapi setelah pengangkatan Supriyadi sebagai pucuk pimpinan TKR, Supriyadi tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya sehingga TKR tidak

mempunyai pimpinan tertinggi. Adapun penyebab tidak munculnya Supriyadi tersebut karena Supriyadi diduga telah dibunuh oleh Jepang setelah ia tertangkap dalam pemberontakannya yang gagal.

Pada awal pembentukannya, TKR terdiri dari beberapa divisi, yakni 10 divisi yang berada di pulau Jawa dan 6 divisi yang berada di Sumatera. Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat, memerlukan satu pimpinan yang kuat dan berwibawa. Untuk mengatasi segala persoalan sebagai akibat dari perkembangan tersebut, maka pada bulan November 1945 atas prakarsa dari markas tertinggi TKR diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR, yang terpilih sebagai pimpinan tertinggi kala itu adalah Kolonel Sudirman, Komandan Divisi V/Banyumas, sebulan kemudian yakni pada tanggal 18 Desember 1945 Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal, sedangkan Oerip Soemohardjo kembali menduduki jabatan lamanya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal” (Poesponegoro, 1992:109).

Pada bulan Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, akan tetapi perubahan nama tersebut tidak berlangsung lama, “... pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Maklumat tentang pergantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI)” (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:32). Selanjutnya, dengan tujuan untuk mempersatukan organisasi perjuangan yang bermunculan pada waktu itu, maka Presiden Soekarno pada tanggal 5 Mei 1947 mengeluarkan penetapan untuk mempersatukan

organisasi-organisasi perjuangan tersebut dalam satu wadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang memutuskan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mempersatukan TRI dengan laskar-laskar perjuangan yang ada pada waktu itu ke dalam suatu organisasi tentara, dan pelaksanaannya dilakukan oleh panitia yang langsung dipimpin oleh presiden sendiri dengan dibantu oleh tiga orang wakil ketua, yakni: Wakil Presiden, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Panglima Besar dengan anggota-anggota terdiri dari Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara (MBT) dan pimpinan badan-badan perjuangan”. (Poesponegoro, 1992:145-146).

Hasil kerja dari panitia yang dipimpin langsung oleh presiden Soekarno dengan dibantu oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dan Panglima Besar Jenderal Soedirman tersebut menghasilkan Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI), adapun dalam Penetapan Presiden tersebut dijelaskan pula tentang pucuk pimpinan dan ketentuan yang mengikat setiap anggota TNI, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:

Susunan pimpinan tertinggi TNI adalah: Pucuk Pimpinan Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI. Anggota-anggotanya adalah Letnan Oerip Soemohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono. Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas kewajiban mengenai siasat dan organisasi, selama proses penyempurnaan Tentara Nasional Indonesia sedang berjalan. Dan semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan taat dan tunduk pada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000:48).

Akhirnya dengan Penetapan Presiden di atas, semua laskar perjuangan dan organisasi perjuangan yang ada di seluruh Indonesia pada waktu itu bergabung menjadi satu dalam organisasi TNI dengan pucuk pimpinan tertinggi Panglima Besar Jenderal Soedirman.

3. Kedatangan Pasukan Sekutu Dan Orang-Orang NICA Ke Wilayah Republik Indonesia

Kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia disambut secara netral oleh rakyat Indonesia, akan tetapi setelah mengetahui bahwa pasukan Sekutu datang dengan membawa orang-orang Belanda yang dengan terang-terangan bertujuan hendak menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia maka sikap rakyat dan pemerintah Indonesia berubah menjadi curiga yang pada akhirnya menjelma menjadi bentrokan serta perlawanan. Perlawanan tersebut terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia, seperti: Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Palembang dan lain-lain.

3.1 Tujuan Kedatangan Pasukan Sekutu di Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disambut hangat oleh seluruh rakyat Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia berkobar pertempuran dan perlawanan rakyat dalam menghadapi tentara Jepang. Hal ini terjadi karena seluruh rakyat Indonesia telah lama menantikan kemerdekaan dan ketika Jepang datang ke Indonesia dan bermaksud menjajah bangsa Indonesia, tentu saja kehendak Jepang tersebut mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia.

Ketika bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tersebut datanglah tentara Sekutu yang dibelakangnya turut serta tentara Belanda. Kedatangan tentara Sekutu yang dibelakangnya membonceng orang-orang Belanda telah menimbulkan amarah bagi rakyat Indonesia sehingga hal ini akhirnya menyulut terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap kehadiran tentara NICA khususnya perlawanan terhadap kedatangan Belanda.

Menurut Sastrosatomo (1987:150), tujuan kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melucuti tawanan perang dan para tahanan yang berada di dalam kamp
2. Mengawal, melucuti dan mengembalikan tentara Jepang yang berada di Indonesia ke negara asalnya.

Tujuan kedatangan orang-orang NICA pada awalnya sama dengan tujuan kedatangan tentara Sekutu di Indonesia, karena sejak awal orang-orang NICA yang datang ke Indonesia hanya sebagai pegawai sipil Sekutu yang bertugas membantu kelancaran tugas tentara Sekutu di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya orang-orang NICA tersebut menggunakan kesempatan ini untuk menyusun kekuatannya guna berusaha mengembalikan kekuasaannya di bumi Indonesia yang pernah tertanam selama hampir tiga setengah abad lamanya, sejak kedatangannya pada tahun 1596.

Dengan demikian, beban perlawanan rakyat Indonesia dalam menegakkan kedaulatannya semakin bertambah, hal ini disebabkan karena perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia selain menghadapi sisa-sisa pasukan Jepang, juga menghadapi pasukan Sekutu yang dengan sengaja membantu orang-orang NICA agar

dapat kembali menanamkan kekuasannya di Indonesia. Hal ini berarti awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ditandai dengan pendaratan pasukan Sekutu yang bertujuan melucuti pasukan Jepang yang ada di Indonesia, pada perkembangan selanjutnya tentara Sekutu tersebut memberikan perlindungan kepada orang-orang NICA yang menggunakan kedok pasukan Sekutu untuk sampai dan masuk kembali ke Indonesia.

3.2 Sikap Rakyat Indonesia Terhadap Kedatangan Sekutu Dan Orang-Orang NICA Di Indonesia

Sebelum pendaratan pasukan Sekutu di wilayah Indonesia, datanglah utusan khusus pasukan Sekutu yang bertujuan mempelajari keadaan di Indonesia dan melaporkannya kepada Komando Pasukan Sekutu untuk wilayah Asia Tenggara. Adapun utusan khusus tersebut beranggotakan sebagai berikut: “Lord Louis Mountbatten sebagai komandan *South East Asia Command* (SEAC) yaitu komando Sekutu yang bertugas untuk wilayah Asia Tenggara yang bermarkas di Singapura, Sir Philip Christison sebagai panglima *Allied Force Netherlands East Indies* (AFNI) yaitu komando khusus yang akan ditugaskan ke Indonesia, serta C.H.O Van Derpalas yang merupakan wakil dari NICA” (Sekretariat Negara: 1988:43).

Setelah mendapat laporan tentang keadaan Indonesia dari utusan khusus tersebut, akhirnya datanglah pasukan sekutu yang didalamnya terdapat orang-orang NICA. Soekarno yang ketika itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan

pernyataan atas kedatangan pasukan sekutu ini dengan syarat seperti yang terdapat dalam kutipan berikut:

“Pasukan sekutu tidak melakukan hal-hal yang dianggap merugikan bagi bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang telah merdeka, dan sebagai imbalannya pemerintah Indonesia bersedia membantu tugas-tugas Sekutu dalam mengatur pemulangan kembali tawanan perang yakni tentara Jepang untuk kembali ke negara asalnya” (Sekretariat Negara, 1988:44).

Pihak Sekutu yang telah melihat secara langsung keadaan di Indonesia pada saat itu sudah memiliki pemerintahan sendiri dan didukung oleh seluruh rakyatnya, akhirnya mereka menyatakan sikap untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia (Poesponegoro, 1992:123).

Berdasarkan tujuan awal kedatangan pasukan Sekutu serta sikap pasukan sekutu yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia maka rakyat Indonesia menyambut kedatangan pasukan Sekutu tersebut dengan sikap terbuka, karena rakyat Indonesia percaya bahwa Sekutu benar-benar akan melaksanakan tugas utamanya, namun kedatangan mereka yang diboncengi oleh orang-orang NICA yang semakin hari semakin banyak jumlahnya dan terus-menerus menyusun kekuatan pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Republik Indonesia akan keinginan orang-orang Belanda yang kali ini memakai nama NICA untuk kembali menjajah Republik Indonesia dan menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia.

Keinginan untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kejadian yang sangat meresahkan penduduk, dimana kota Jakarta menjadi sasaran orang-orang NICA tersebut. Tindakan NICA akhirnya mendapat perlawanan

dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, sehingga menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak, “Sikap ini merupakan tanda bahwa rakyat Indonesia tidak ingin kembali dijajah oleh Belanda” (Sekretariat Negara, 1988:49).

Pada bulan Agustus hingga Oktober 1945, terjadi perebutan kekuasaan antara Indonesia yang berusaha menegakkan kedaulatan sebagai negara yang baru merdeka dan Jepang yang mencoba mempertahankan keadaan *Status Quo* sampai Sekutu datang ke Indonesia.

“Pada tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu mendarat di Tanjung Priok, dalam rombongan pasukan Sekutu tersebut terdapat pasukan Belanda, kedatangan pasukan Sekutu yang didalamnya terdapat pasukan Belanda inilah yang mendapat reaksi keras atau tentangan dari rakyat Indonesia” (Engelen, 1997:136). Untuk menunjukkan betapa besar tekad rakyat Indonesia untuk merdeka sekaligus mempertahankan kemerdekaan tersebut maka, pada tanggal 19 September 1945 diadakanlah Rapat Raksasa di Lapangan Ikada (sebelah Barat Stasiun Gambir, Jakarta).

Walaupun pihak Jepang melarang diadakannya Rapat Raksasa tersebut, tetapi dengan tekad bulat dan semangat yang berkobar-kobar untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan seluruh rakyat Indonesia sanggup mempertahankan kemerdekaan tersebut sampai titik darah penghabisan maka rakyat tetap berbondong-bondong mendatangi lokasi rapat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tentara Jepang yang ketika itu bersenjata lengkap dapat dipatahkan oleh semangat bangsa Indonesia yang memiliki keyakinan diri hendak menentukan nasib sendiri tanpa dijajah oleh bangsa manapun.

Reaksi keras atas masuknya Sekutu dengan membonceng Belanda ke Indonesia juga mendapat tentangan keras dari rakyat Indonesia yang ada di Surabaya, Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Pada tanggal 19 September 1945 Mereka (Belanda) menaikkan bendera Belanda – Merah Putih Biru di Hotel Yamato (bekas hotel Oranje, sekarang hotel Gajah Mada) di Tunjungan Surabaya. Rakyat Surabaya tersinggung harga dirinya, lalu beramai-ramai menyerbu Hotel Yamato, warna biru dirobek dari bendera itu, tinggal warna merah dan putih yang terpancang sebagai lambang kemerdekaan bangsa Indonesia (Engelen, 1997:192).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa semangat rakyat Indonesia untuk menyatakan dan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar, walaupun sebagai akibat dari insiden bendera itu terjadi perkelahian dan pertempuran, akan tetapi dengan semangat yang membara rakyat Indonesia siap menghadapinya, hal ini ditunjukkan oleh rakyat Surabaya pada keesokan harinya melakukan arak-arakan secara besar-besaran di seluruh kota untuk menunjukkan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan.

“Di Semarang (Jawa Tengah), kedatangan pasukan Sekutu terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethell” (Engelen, 1997:194). Secara umum, pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang oleh pasukan Sekutu di Jawa Tengah berjalan lancar. Akan tetapi akibat sikap Belanda yang terus memprovokasi para pemuda pejuang akhirnya timbul pemboikotan dari pihak pemuda.

Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Semarang dan menjalar ke Magelang, Ambarawa dan tempat-tempat lain. Pasukan pemuda Indonesia atau laskar pemuda yang tergabung dalam pasukan gerilaya dari Yogyakarta, Solo dan sekitarnya

menyerbu ke daerah sekitar Magelang dan Ambarawa sehingga pasukan Sekutu terjepit, dalam keadaan terjepit inilah Sekutu mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia yang diwakili oleh Soekarno dan Amir Syarifudin dan pimpinan tentara, dalam perundingan tersebut tercapai kesepakatan bahwa Sekutu diizinkan membawa sejumlah pasukan yang dianggap perlu untuk melindungi tahanan perang yang akan dipindahkan ke Semarang.

Persetujuan yang telah tercapai antara Sekutu dengan Indonesia akhirnya buyar setelah para pejuang di Jawa Tengah mengetahui bahwa di Surabaya terjadi pertempuran besar yakni pada tanggal 10 November 1945, pihak Indonesia tidak percaya lagi kepada Sekutu, akibatnya pertempuran besar terjadi di Semarang, Magelang dan Ambarawa antara pihak Sekutu dan Indonesia. Karena tidak mampu menguasai Magelang dan Ambarawa, pasukan Sekutu memutuskan untuk meninggalkan Magelang, mendengar hal tersebut, para pejuang mengepung Ambarawa. Karena kalah dari segi persenjataan akhirnya pasukan Sekutu berhasil membebaskan sekitar 3000 orang tahanan perang dan memindahkannya ke Semarang. Setelah berhasil memindahkan para tahanan tersebut, akhirnya pada bulan November 1945 pasukan Sekutu memutuskan untuk meninggalkan Ambarawa. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa pasukan Sekutu hanya tinggal menguasai kota Semarang, sedangkan seluruh daerah Jawa Tengah kecuali Semarang dikuasai oleh pihak Indonesia.

“Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945” (Poesponegoro, 1992:116). Kekuatan pasukan yang ikut bertempur di Ambarawa ini berjumlah 19 batalyon TKR dan beberapa batalyon

perjuangan. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan yang berasal dari Purwokerto Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, maka Kolonel Sudirman, panglima Divisi di Purwokerto mengambil alih pimpinan pasukan. Berkat kepemimpinan Kolonel Soedirman, pertempuran di Ambarawa berhasil dimenangkan dan pasukan Sekutu dapat dipukul mundur ke Semarang sehingga Yogyakarta sebagai tempat kedudukan markas tertinggi TKR dapat diamankan.

“Di Medan, Sumatera Utara, pasukan Sekutu mendarat pada tanggal 9 Oktober 1945. Kekuatan mereka adalah 1 brigade yaitu Brigade-4 dari Divisi India ke-26” (Poesponegoro, 1992:119). Pada awalnya sikap pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara adalah bekerja sama dengan pasukan Sekutu untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ada di Medan, akan tetapi karena sikap dan cara yang tidak sopan ditunjukkan oleh pasukan Sekutu terutama yang berasal dari Belanda, maka terjadilah insiden yang mengakibatkan terjadinya pertempuran, bahkan pertempuran tersebut menjalar sampai ke Pematang Siantar dan Brastagi.

Ketegangan kembali tersulut setelah pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly memerintahkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada Sekutu, tentu saja perintah tersebut ditolak. Sebagai akibatnya terjadi pertempuran di berbagai tempat, “Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan markas TKR yang ada di Trepes, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan beberapa truk berhasil dihancurkan dan seorang perwira Inggris terbunuh” (Poesponegoro, 1992:120).

Peristiwa pertempuran yang menewaskan seorang perwira Inggris tersebut membuat pasukan Sekutu kembali mengultimatum kepada pemuda dan pejuang untuk menyerahkan senjata, dan barang siapa yang tidak menuruti ketentuan ini akan ditembak mati. Daerah yang ditentukan adalah kota Medan dan delapan setengah kilometer dari batas kota Medan dan Belawan. Perlawanan terus memuncak, pada bulan April 1946 tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia ke luar kota Medan. Kantor gubernur, markas Divisi TKR, dan kantor walikota pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan. Walaupun kota Medan berhasil dikuasai oleh Inggris, akan tetapi perlawanan tetap dilakukan oleh para pemuda dan para pejuang untuk mengagakkan dan mempertahankan kemerdekaan.

Di Bandung kekalahan Jepang atas Sekutu, telah mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan antara Indonesia dan Jepang. Pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (*Artillerie Conctrustive Winkel*, sekarang Pindad). Pertempuran terus terjadi sampai datangnya pasukan Sekutu di kota Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945.

Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, perebutan kekuasaan terjadi pada tanggal 5 Oktober 1945, dimana residen Sumatera Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawainya menaikkan bendera Merah Putih. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh keresidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia, berbeda dengan tempat lainnya di Indonesia, di Palembang perebutan kekuasaan menjelang kedatangan pasukan Sekutu tidak terjadi Insiden, hal ini disebabkan karena orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi insiden tersebut.

4. Usaha Belanda untuk Menguasai Indonesia Setelah Kedatangan Pasukan Sekutu

Kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia yang pada awalnya disambut dengan sikap terbuka oleh rakyat Indonesia berubah menjadi perlawanan-perlawanan sebagai akibat atas tindakan orang-orang NICA yang dianggap meresahkan penduduk. Perlawanan-perlawanan tersebut semakin memuncak setelah pasukan Inggris yang merupakan pasukan inti Sekutu pada bulan November 1946 meninggalkan Indonesia karena menganggap tugasnya di Indonesia sudah selesai. Kedudukan pasukan Inggris tersebut diganti oleh tentara NICA yang berasal dari Belanda. Keberadaan orang-orang NICA tersebut semakin mendapat tentangan dan perlawanan akibat ulah mereka yang semakin aktif melakukan teror terhadap rakyat Indonesia.

Tingkah laku orang-orang NICA yang terus melakukan kerusuhan dan teror terhadap rakyat Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia, selain itu Belanda ingin mempertahankan *dominasi kolonialismenya* di Indonesia, dan untuk mencapai hal tersebut, Belanda menempuh jalan apa saja, baik jalan militer maupun jalan politik.

Secara politik, Belanda melancarkan provokasi yang mengatakan bahwa, “Di Indonesia tidak ada suatu pemerintahan apapun, kecuali pemerintahan kolonial Belanda yang tetap berkuasa di Indonesia, sedangkan secara militer Belanda aktif memamerkan kekuatannya dengan jalan melakukan tindakan-tindakan teror terhadap rakyat Indonesia” (Nasution, 1984:331).

Sebagai akibat dari bentrokan bersenjata antara Belanda dan Indonesia tersebut, maka atas prakarsa Inggris, masalah kedua belah pihak tersebut akhirnya dibawa ke meja perundingan. Akhirnya setelah melalui proses perundingan yang cukup panjang kedua belah pihak menyetujui suatu perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 10 November 1946, adapun isi perjanjian Linggarjati tersebut adalah :

Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk negara federasi yang bernama Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat tetap mengikatkan diri dalam kerjasama dengan kerajaan Belanda dengan berwadahkan Uni Indonesia Belanda yang ketuanya ratu Belanda (Posponegoro, 1988:108).

Isi perjanjian Linggarjati ini sebenarnya sangat merugikan Indonesia, karena Republik Indonesia nantinya akan merupakan bagian dari Uni Indonesia-Belanda, dimana Uni Indonesia-Belanda itu sendiri akan diketuai oleh Ratu Belanda. Hal ini berarti usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia sudah menampakkan hasil walau tidak secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Engelen, E.O. dkk. 1997. *Lahirnya Suatu Bangsa dan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution, A.H. 1983, *Sekitar Perang Kemerdekaan, Agresi Militer Belanda Ke- II*, Bandung: Angkasa.
- Posponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto. 1984. *Sejarah Perjuangan Indonesia Jilid IV*, Jakarta: Balai Pustaka
- Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. *Peranan TNI Jilid I (1945-1949)*, Jakarta: Markas Besar TNI.
- Salim, Ismail. 1995. *Teronosan PDRI dan Peranan TNI dalam Perjuangan Politik dan Militer Kemerdekaan Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sekretariat Negara, 1988. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1965*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Simatupang, T.B. 1981. *Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Lembaga Analisis Informasi. 2000, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Pressindo.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 510842
(0711) 513078, E-mail: fkip_ump@yahoo.com

USUL JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

No. 37.02.367/G.17.1/FKIP UMP/KPTS/2006

Nama : Dedi Darma Yanta
NIM : 35 2002 014
Jurusan : Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi : 1. Peranan Tentara Nasional Indonesia pada Serangan
Unum In Maret 1949 di Yogyakarta
ACC of 17/06.
2. Sejarah dan Perkembangan Partai Komunis Indonesia
(PKI) di Indonesia (1920 – 1965)
3. Peranan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Pada Masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia
(1945 – 1949)

*KPS.
17/06.
acc*

Diusulkan Judul Nomor : 1 (satu)

Pembimbing I : Drs. Ali Mansyur

Pembimbing II : Dra. Nurhayati Dina

Bats Waktu Penyelesaian Skripsi : _____

Palembang, 17 Juli 2006

H
M

Ketua Program Studi,

Dra. Nurhayati Dina

Dibuat rangkap tiga:

1. Ketua Program Studi
2. Pembimbing Utama
3. Pembimbing Pembantu

SURAT PERMOHONAN MAHASISWA

Hal : *Permohonan Dosen Pembimbing*
Penulisan Skripsi

Yth. Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Assalamu'alaikum w.w.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI DARMA YANTA
NIM : 352002014
Program Studi : SEJARAH

Mengajukan permohonan dosen pembimbing penulisan skripsi, yaitu :

1. Drs. ALIMANSYUR → Pemb. I
 2. Drs. DJUMIRAN
 3. Dra. NURHAYATI DINA → Pemb. II
- 3/24/06.
/4

Atas dikabulkan permohonan ini, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalam
Palembang,
Pemohon,



DEDI DARMA YANTA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 510842
Fax (0711) 513078, E-mail: fkip_ump@yahoo.com

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Nomor: 35.2001.087/G.17.2/KPTS/FKIP UMP/2006

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

MEMPERHATIKAN : Surat permohonan mahasiswa kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk pembimbing penulisan skripsi

MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa FKIP UMP dalam menyelesaikan program studinya, diperlukan pengangkatan dosen pembimbing penulisan skripsi
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu diterbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai landasan hukumnya.

MENINGAT : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999
4. Piagam Pendirian UMP Nomor: 036/III.SMs.79/80
5. Keputusan MPT PPM Nomor: 44//KEP/I.3/C/2003

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat dosen pembimbing penulisan skripsi mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama	NIM	Dosen Pembimbing
Dedi Darmayanta	352002014	1 Drs. Alimansyur 2 Dra. Nurhayati Dina

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Rabiulakhir 1427 H.
19 Mei 2006 M.



Drs. H. A. Hussein Fattah, M.M.

Tembusan:

1. Ketua Program Studi
2. Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 510842,
Fax (0711) 513078, E-mail: fkip_ump@yahoo.com

PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DEDI DARMA YANTA
NIM : 352002014
Jurusan : IPS.
Program Studi : PENDIDIKAN SEJARAH.
Judul Skripsi : PERANAN TENTARA NASIONALINDONESIA PADA
SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 DI YOGYAKARTA.

yang bersangkutan **DIPERKENANKAN** mengikuti ujian skripsi.

Palembang, FEBRUARI 2006

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. M. ALI MANSYUR

Dra. NURHAYATI DINA

SURAT PERMOHONAN MAHASISWA

Palembang, FEBRUARI 2007

Hal : ***Permohonan Dosen Penguji Skripsi***

Yth. Dekan
FKIP Universitas Muhammadiyah
Palembang

Assalamualaikum w. w.

Yang bertanda tangan di bawah ini

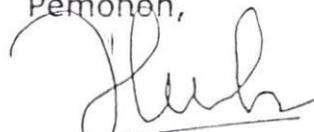
Nama : DEDI DARMA YANTA
NIM : 352002014
Program Studi : PENDIDIKAN SEJARAH.

mengajukan permohonan dosen penguji skripsi, yaitu:

1. Drs. DJUMIRAN
2. Drs. MUHAMMAD HYAS
3. Dra. FATMAH

Demikianlah permohonan ini saya buat, mohon kiranya Dekan dapat mengabulkannya, Saya ucapkan terima kasih.

Wasalam
Pemohon,



DEDI DARMA YANTA.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LAPORAN KEMAJUAN
BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dedi Darma Yanta
 NIM : 35 2002 014
 Judul : PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PADA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 DI
YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing : 1. Drs. M. Ali Mansyur
2. Dra. Nurhayati Dina

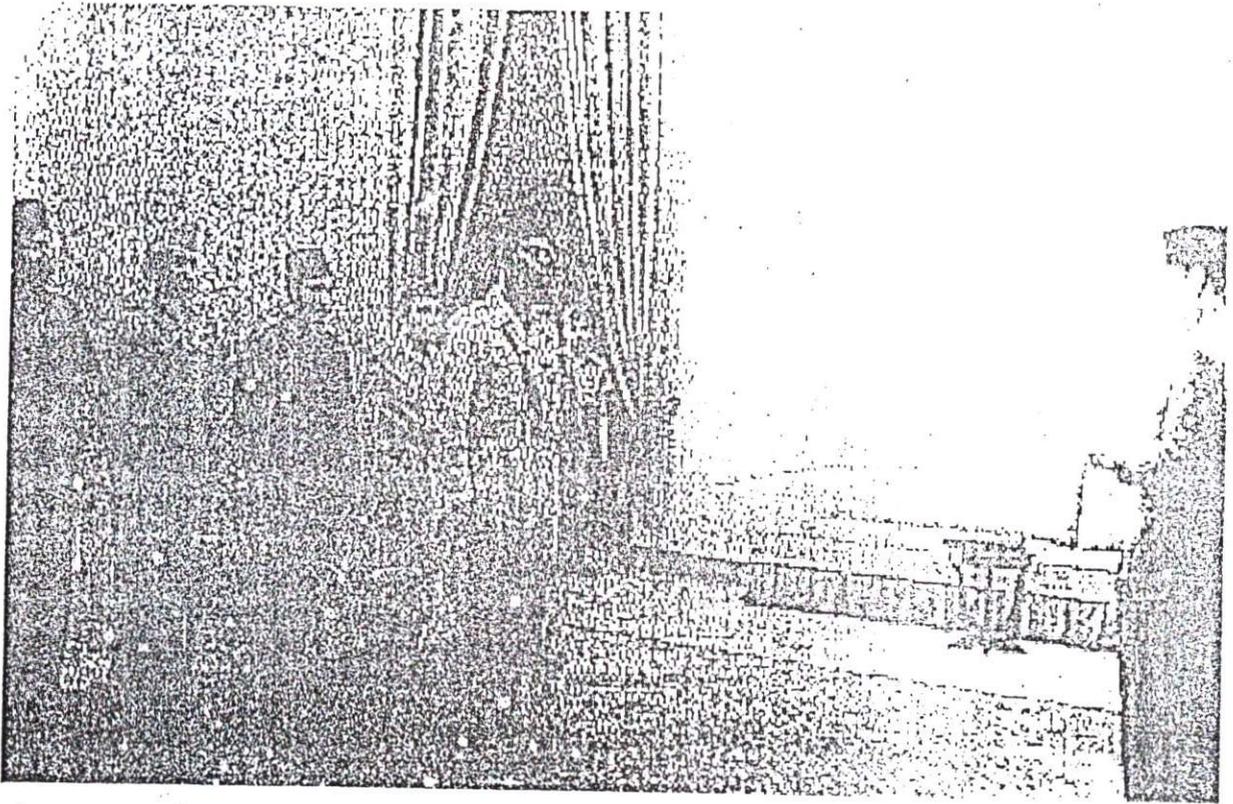
Pertemuan Ke-	Pokok Bahasan	Catatan/Komentar	Paraf & Tanggal Konsultasi	Tanggal Selesai
1/2	Judul	ACC		17 Juli 2006
2/1	Judul	ACC No. 1 ke Proposal		19 Juli 2006
3/2	Proposal	Cara pengetikan, pembatas metode yang digunakan	11. Okt 2006	
4/2	Perbaikan	- Gunakan kalimat yang lama jangan berubah - Tambah materi di kajian pustaka, cara pengetikan	29 Nov 2006	
5/2	Perbaikan	Cara pengetikan, tambah materi di kajian pustaka tentang reaksi	6 Des 2006	
6/2	Perbaikan	- Penulian RI harus konsisten - Tinjau kembali sejarah berdirinya TNI - Sub judul diberi uraian	18 Des 2006	
7/2	Perbaikan	Cara pengetikan	27 Des 2006	
8/2	Proposal	ACC ke Bab I		10 Jan 2007
9/1	Proposal	Perbaiki proposal	14 Jan 2007	
10/1	Proposal	ACC ke Bab I		15 Jan 2007
11/2	Bab III	Cara pengetikan	3 Jan 2007	
12/2	Bab I, II, III	ACC		16 Jan 2007
13/1	Bab I, II	ACC		16 Jan 2007
14/1	Bab III	Perbaikan	17 Jan 2007	
15/1	Bab III	ACC ke Bab IV		19 Jan 2007
16/2	Bab IV	Perbaikan cara pengetikan, kata-kata asing dicetak miring, tambah materi pada akhir yakni Belanda meninggalkan Indonesia	29 Des 2006	
17/2	Bab IV	ACC		19 Jan 2007

Pertemuan Ke-	Pokok Bahasan	Catatan/Komentar	Paraf & Tanggal Konsultasi	Tanggal Selesai
18/2	Bab V Abstrak Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran	- Berikan judul, kesimpulan sesuai dengan bahasan yang dimulai dari latar belakang - Susun seperti yang lama - Huruf Kapital dicetak miring - Tambahkan Foto dan Keterangan yang berkaitan dengan skripsi	 27 Jan 2007	
19/2	Bab V Abstrak Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran Pengecekan Terakhir	- Tambah isi di poin 3 - Pengetikan ditambah masukan saran - Hapus tanda koma - Tambah daftar tabel - Tambah daftar tabel - Perbaiki tabel, kutipan	 30 Jan 2007	
20/2	Bab V Daftar Rujukan Riwayat Hidup Kata Pengantar Abstrak	ACC ACC ACC ACC ACC Cara pengetikan		 1 Feb 2007
21/2	Abstrak	ACC		 8 Feb 2007
22/1	Bab V Abstrak Daftar Isi Kata Pengantar Riwayat Hidup Daftar Rujukan	Perbaikan Perbaikan Perbaikan ACC ACC ACC		5 Feb 2007
23/1	Bab V Abstrak Daftar Isi	ACC ACC ACC		12 Feb 2007
24/2	Pengecekan Terakhir	Siap untuk diujikan		 15 Feb 2007
25/1	Pengecekan	Siap untuk Ujian		16 Feb 2007

RIWAYAT HIDUP

Dedi Darma Yanta dilahirkan di Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 23 April 1985, anak kedua dari empat bersaudara. Pasangan Bapak Asman Riduan dan Ibu Kholijah Unik. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 1 Sumber Hidup tamat tahun 1996 dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Fedamaran tamat tahun 1999, sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMK 2 Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tamat tahun 2002.

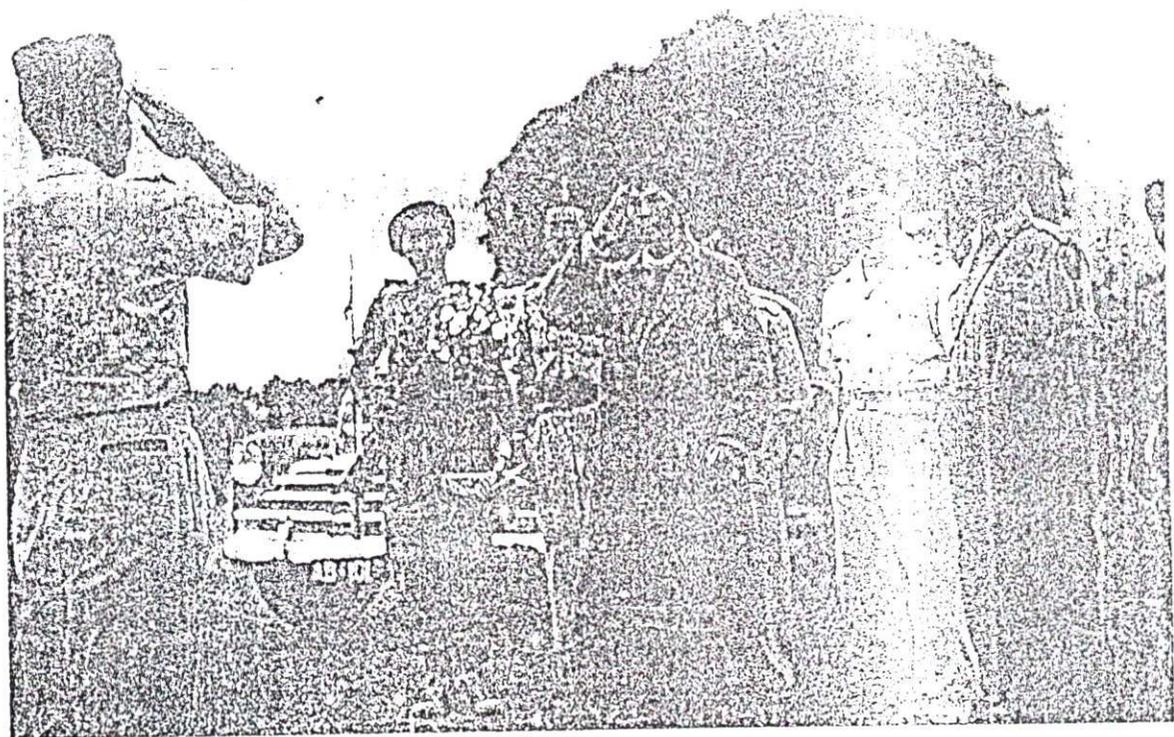
Pendidikan berikutnya ditempuh di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang hingga selesai tahun 2007.



Gambar 1. Pelantikan Jenderal Soedirman Menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Yogyakarta, Juni 1947



Gambar 2. Pasukan TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman Meninggalkan Ibukota Yogyakarta



Gambar 3. Kembalinya Pucuk Pimpinan TNI Jenderal Soedirman dan Letnan Kolonel Soeharto Ke Yogyakarta Setelah Agresi Militer Belanda II

Tabel 3.1 Tahap-Tahap Penelitian

Uraian	Agustus 2006	September - Oktober 2006	November 2006	Desember 2006	Januari 2007	Februari 2007
Usul Judul	√					
Pengumpulan Data		√				
Pengajuan Proposal			√			
BAB I, II, III				√		
Bab IV dan V					√	
Daftar Isi, Daftar Rujukan, Kata Pengantar, dan Abstrak					√	
Penjilidan						√